

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Agustus II Tahun 2022 No. 38

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



PKS

*H. Ahmad Syaikh*

*PKS Daftar Hari Pertama*

**Bukti Semangat  
dan Kesiapan  
Kami di Pemilu  
2024**



# Indonesia Milik Kita Semua

Bangsa ini bangsa besar dalam seluruh aspeknya: wilayahnya, sumber daya alamnya, suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya, agamanya, dan alam pikiran manusianya. Dalam kebesaran Indonesia tersebut, kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh merasa paling hebat sendiri, tidak boleh merasa paling Pancasila dan NKRI.

Indonesia ini milik kita semua. Titik temu kebangsaan kita bernama Pancasila yang diterjemahkan dalam Konstitusi UUD 1945. Kita boleh berbeda suku, ras, agama, dan antargolongan, tapi kita hidup sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air: Indonesia.

Pancasila adalah pedoman kita untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) di bumi Allah bernama Indonesia. Perbedaan adalah sunnatulloh, bahkan satu diantara anugerah Allah Swt. Allah berfirman dalam Al-Qur'an "Wahai manusia,

sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal.. (Al-Hujurat: 13).

Bukan perbedaan-nya yang menjadi fokus kita tapi persatuan kita untuk mengokohkan ke-Indonesia-an. Itu mengapa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka adalah kekayaan kita, Tunggal Ika adalah cara kita membesarkan dan memajukan Indonesia.

Bangsa ini bangsa besar dalam seluruh aspeknya:

wilayahnya, sumber daya alamnya, suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya, agamanya, dan alam pikiran manusianya. Dalam kebesaran Indonesia tersebut, kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh merasa paling hebat sendiri, tidak boleh merasa paling Pancasila dan NKRI.

Sikap yang demikian hanya akan memecah-belah, mensegregasi, menimbulkan disharmoni dan akhirnya disintegrasi bangsa. Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian. Bangsa ini akan

menjadi besar dan maju jika kita saling bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi tanpa memandang suku, ras, agama, golongan dan status atau strata sosial ekonomi. Inilah yang kita sebut persatuan Indonesia.

Sebagaimana para pahlawan telah memberikan contoh bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan persatuan dan bukan dengan perpecahan. Mari kita hentikan sikap permusuhan, memecah-belah, menyebarkan fitnah, hoax dan kebencian (hate speech) di antara sesama anak

bangsa. Sikap tersebut bukan saja tidak berfaedah, tapi lambat laun menjerumuskan dan negara gagal (failed state). Sikap tersebut juga sangat jelas dilarang agama dan dibenci Allah Swt.

Mari kita kembali pada jati diri bangsa kita yang ramah, sopan santun, tenggang rasa, tepo seliro, dan gotong royong. Hidup bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali lagi, Indonesia milik kita semua. Merdeka. Allahu Akbar!!



# Ketua Majelis Syura PKS DR. SALIM

Kembali menerima gelar adat nussantara saat kunjungan ke sulsel

Gelar adat yang diterima sebelumnya:

## 1 KEPULAUAN RIAU

Dato Wira  
Cahaya  
Buana

Dato Wira merupakan gelar tertinggi yang diberikan kepada tokoh nasional oleh LAM tingkat kabupaten/kota.

Dr. Salim dinilai memiliki kriteria sebagai tokoh yang dihormati karena jasa-jasanya yang telah memancarkan sinar atau memberikan cahaya ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia.



## 2 LAMPUNG

Yang Mulia  
Datuan  
Satria  
Negara

Sebagai mandat untuk menjaga NKRI dengan dasar negaranya Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi.



## 3 SULAWESI SELATAN

1 Waliuddin Karaeng Manaba

Maknanya adalah sosok bangsawan tinggi yang ramah, memasyarakat, peduli, peka, berpengetahuan luas dan senantiasa teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan kebalikan.

“ Saat mendapat gelar tersebut, saya tidak berbangga-bangga, justru banyak muatan lokal di dalamnya perlu digali. Tidak hanya disini, kita pun bisa dapatkan di seluruh negeri. Seperti di Sulteng dengan bahasa Kaili nya yang artinya, jika kamu berbuat baik, kebaikan pula yang akan kamu dapatkan.

Dr. Salim (Ketua Majelis Syura PKS)





# Fraksi PKS DPR Usul Pembentukan Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

## KUTIPAN

Jakarta (05/08) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggagas usul penggunaan Hak Angket DPR untuk permasalahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers Fraksi PKS yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Komisi V Suryadi Jaya Purnama dan Anggota Komisi VI Amin Ak di Gedung DPR Senayan, Jum'at, (05/08).

Menurut Jazuli Juwaini, DPR memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada pemerintah. Banyak kritik publik sejak awal menyangkut utilitas, urgensi, feasibilitas atau kelayakan dan persoalan penganggarannya.

"Usulan penggunaan hak angket sangat penting untuk

menyelidiki dan mengurai secara terang benderang masalah demi masalah yang terjadi pada proyek KCJB demi akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara pada proyek ini," ungkap Jazuli.

Kalangan dewan, pengamat, dan publik luas mencium ketidakberesan proyek KCJB sejak awal. Mulai janji dan pemerintah untuk menjadikan proyek ini murni dilakukan BUMN dengan skema business to business (btb). Pemerintah juga menyatakan komitmen bahwa biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China.

"Tetapi dalam perjalanannya, janji dan komitmen tersebut ternyata nihil. Negara harus

menanggung biaya melalui penyertaan modal negara (PMN) dari 2020 hingga 2023 sebesar 15,2 Trilyun plus Dana Talangan. Bahkan dalam perkembangannya KCJB menuntut pemerintah Indonesia untuk menanggung pembengkakan biaya proyek konstruksi dan cost over run," ungkap Jazuli.

Menurut Jazuli kesalahan kalkulasi dan perencanaan proyek KCJB fatal. Proyek ini juga menyangkut dibawa Presiden yang dahulu menyebut tidak sepeser pun menggunakan APBN, tapi kenyataannya menjadi beban APBN melalui PMN. Belakangan tersiar berita 'lepas tangannya' konsorsium yang didominasi Cina dan melimpahkan pembengkakan biaya proyek ke negara.

Fraksi PKS Konsisten Menolak PMN KCJB  
Anggota DPR Dapil Banten ini menyatakan bahwa Fraksi PKS sejak awal memberi kritik terhadap proyek KCJB karena sejumlah permasalahan mulai soal tender yang berpolemik, awalnya konsorsium Jepang yang masuk tapi kemudian



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Fraksi PKS menolak proyek KCJB dengan pendanaan dari APBN karena jelas membebani keuangan negara apalagi di tengah kondisi defisit akibat pandemi covid 19 dan resesi ekonomi global. Maka dengan tegas Fraksi PKS menolak penyertaan modal negara untuk KCJB sejak 2020 hingga 2022 dalam pembahasan anggaran di DPR,"

batal digantikan Cina dengan alasan yang tidak jelas. Proyek juga dikhawatirkan akan membebani keuangan negara yang nyata-nyata terbukti saat ini. Selain itu, Fraksi PKS melihat

perencanaan sangat tidak matang baik dari sisi ekonomi maupun teknis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Wakil Ketua FPKS: Proyek Kereta Cepat Jauh dari Perencanaan dan Bebankan APBN

## KUTIPAN

Jakarta (05/08) — Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan konferensi pers yang bertajuk “Usulan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)” di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI. Konferensi pers menghadirkan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, beserta jajaran pimpinan lainnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Infrastruktur Pembangunan, Mulyanto memberikan beberapa catatan untuk proyek KCJB.

Fraksi PKS, katanya, selama beberapa bulan mengamati sekaligus mendalami isu KCJB. Akan tetapi, sambungnya, pengamatan Fraksi PKS sudah sampai pada titik untuk pengambilan sikap mengingat proyek KCJB jauh dari perencanaan sebab biaya proyek yang overrun dibebankan pada APBN.

Selanjutnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS

Komis VI, Amin Ak, menyampaikan keprihatinannya terhadap proyek KCJB.

“Nasib BUMN sedang tertatih-tatih. Ekuitas terbesar memang mayoritas dipegang oleh Indonesia, tetapi tetap saja kurang dana. Proyek ini tentu sangat memberatkan BUMN,” kata Amin.

Selain menyorot nasib BUMN, Amin juga menjelaskan proyek KCJB dari perspektif bisnis. Secara perhitungan bisnis, tuturnya, proyek ini tidak akan pernah untung karena

pengeluarannya membengkak hingga menyentuh angka Rp114 triliun yang semula direncanakan sebesar Rp27 triliun.

“Dibutuhkan waktu sekitar 42 tahun untuk menutupi biaya pembangunan. Itu baru penghitungan dari pemasukan, belum lagi jika dihitung biaya operasionalnya, bisa-bisa memakan waktu hingga ratusan tahun untuk mencapai keuntungan,” tegas Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV ini.

“Kami setuju jika Penyeretaan Modal Negara (PMN) digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk KCJB kami tidak setuju karena nantinya justru jadi beban rakyat. Sebagaimana kita ketahui, proyek ini dibiayai 70 persen dari hutang kepada China Development Bank ditambah bunganya. Kemudian, 25 persen dibiayai oleh konsorsium yang terdiri dari empat BUMN dan kemungkinan dibebankan pada rakyat kecil dalam bentuk pajak,” pungkasnya mengakhiri.



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

Fraksi PKS, selama beberapa bulan mengamati sekaligus mendalami isu KCJB. Akan tetapi, sambungnya, pengamatan Fraksi PKS sudah sampai pada titik untuk pengambilan sikap mengingat proyek KCJB jauh dari perencanaan sebab biaya proyek yang overrun dibebankan pada APBN.

# Aleg PKS: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bermasalah Sejak Awal

## KUTIPAN

Jakarta (05/08)— Fraksi PKS DPR RI menggelar acara Public Expose bertajuk Konferensi Pers guna mengusulkan pembentukan Pansus Angket terhadap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi V DPR RI dari FPKS, Suryadi Jaya Purnama, menjelaskan bahwa proyek kereta cepat ini tidak dibekali dengan kajian mendalam.

"Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, selain bermasalah dari sisi pembiayaan dan pengelolaan keuangan, juga bermasalah secara teknis", ujarnya dalam Konpers yang dilangsungkan di Ruang Meeting FPKS DPR RI, Senayan, pada Jumat siang (05/08) tersebut.

Misalnya, papar Suryadi, terungkap bahwa penyebab utama molornya pembangunan tersebut dikarenakan adanya temuan geologis tanah yang berbeda dari apa yang di perkirakan.

"Seharusnya, aspek teknis soal kontur tanah-geologi tanah seperti ini sudah selesai di awal dengan studi yang memadai, tidak lagi ditengah jalan baru tahu ternyata jenis tanahnya seperti ini (sulit)", tegas Suryadi.

Ia pun mengkritik lokasi stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

"Seharusnya peletakan stasiun itu berdekatan dengan pusat aktivitas masyarakat. Sementara, ini (KCJB) tidak. Artinya, kereta cepat ini belum menjadi solusi transportasi

Jakarta-Bandung", ujarnya lagi.

Oleh sebab itu, menurut Suryadi, agar pembangunan proyek bermasalah ini tidak terulang kembali, perlu dibentuk pansus guna mendalami setiap masalah yang ada.

"Dari sisi perencanaan konstruksi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta- Bandung ini sangat bermasalah. Kami siap mendalami masalah ini dalam bentuk Pansus agar kerugian negara tidak terulang", pungkasnya.



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T**  
Anggota Komisi V DPR RI

"Seharusnya peletakan stasiun itu berdekatan dengan pusat aktivitas masyarakat. Sementara, ini (KCJB) tidak. Artinya, kereta cepat ini belum menjadi solusi transportasi Jakarta-Bandung. Oleh sebab itu agar pembangunan proyek bermasalah ini tidak terulang kembali, perlu dibentuk pansus guna mendalami setiap masalah yang ada."





## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



# Politisi PKS Minta Pemerintah **Selamatkan Nelayan Kecil** Akibat Harga BBM Meroket

## KUTIPAN

Jakarta (01/08) — Tingginya Harga BBM yang melangit, terutama solar untuk memenuhi kebutuhan melaut yang mencapai 23 ribu rupiah per liter membuat nelayan kecil semakin tercekik.

Kondisi ini menurut anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin sudah sangat mengkhawatirkan karena efek domino bagi masyarakat nelayan semakin terpuruk hingga pemenuhan konsumsi produk perikanan semakin jatuh yang bila dibiarkan akan sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Akmal menambahkan, bukan saja situasi perekonomian negara kita yang terguncang akibat tingginya harga BBM untuk nelayan ini, akan tetapi juga mempengaruhi kualitas SDM kita yang semakin mengencil konsumsi protein yang jika berlarut akan mengancam naiknya angka stunting di negara ini.

“Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan ini yang telah membuat mangkrak 2000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur. Mesti ada aksi nyata bagi pemerintah untuk memberikan solusi seperti 69 persen nelayan yang kesulitan membeli solar subsidi mesti dipermudah. Begitu juga 78 persen nelayan terutama nelayan kecil yang mengalami kesulitan memperoleh rekomendasi mendapat solar subsidi mesti ada kemudahan”, Kritis Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengaku, telah mendapat ratusan aspirasi dari

masyarakat yang ada di daerah pemilihannya yang sebagian besar masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan, agar tingginya harga solar ada kebijakan dari pemerintah untuk nelayan kecil untuk sekedar menyambung hidup.

Menurutnya, Nelayan Kecil dengan kapal sekitar 5GT hingga 30 GT ini mengambil ikan hanya seperlunya saja. Tidak ada eksploitasi merusak lingkungan, namun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat sekitar.

Politisi PKS ini mengkritisi tindakan pemerintah yang relatif lambat dalam setiap kebijakan pro kerakyatan, Sehingga ketika sudah kejadian seperti tingginya berbagai komoditas strategis seperti BBM ini, lantas menjadi panik tak punya solusi.

Akmal menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat mesti memberi solusi untuk menyelamatkan nelayan kecil ini akibat harga BBM yang meroket.



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan ini yang telah membuat mangkrak 2000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur. Mesti ada aksi nyata bagi pemerintah untuk memberikan solusi seperti 69 persen nelayan yang kesulitan membeli solar subsidi mesti dipermudah. Begitu juga 78 persen nelayan terutama nelayan kecil yang mengalami kesulitan memperoleh rekomendasi mendapat solar subsidi mesti ada kemudahan”

Naiknya Harga Tiket Masuk TN Komodo

# Aleg PKS: Pemerintah 'Gagal Paham' Buat Kebijakan

## KUTIPAN

Sumbawa (05/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai kenaikan harga tiket yang luar biasa untuk berwisata ke Taman Nasional (TN) Komodo sebagai bentuk kebijakan yang salah kaprah,

Menurutnya hal ini disebabkan tidak ada payung hukum yang kuat untuk memberlakukan kebijakan tersebut sehingga menimbulkan polemik dan penolakan luas dari berbagai kalangan masyarakat.

"Saya ingatkan Pemerintah jangan gagal paham dalam membuat ketentuan soal tarif tiket masuk TN Komodo ini, sebab diperlukan payung hukum seperti Perda (Peraturan Daerah) dan regulasi turunannya agar kebijakan tersebut memang telah melewati proses yang cukup matang yakni melalui proses pembahasan yang melibatkan banyak stakeholders dan berbagai masukan public, namun jika ditetapkan tarif secara serampangan seperti ini maka berdampak serius berupa penolakan secara luas", ucap Johan.

Johan menjelaskan bahwa kenaikan tarif yang mencapai Rp 3,75 juta untuk bisa berwisata di TN Komodo pasti berdampak 'membunuh' usaha kecil menengah dan merugikan pelaku/pegiat pariwisata lokal dan indikasinya hal ini hanya akan menguntungkan bisnis perusahaan tertentu.

"Saya mendorong agar Pemerintah menata kegiatan bisnis pariwisata dan bentuk bisnis lainnya di TN Komodo secara komprehensif dengan berprinsip tetap menjaga kelestarian populasi Komodo, kenyamanan pengunjung dan melibatkan berbagai kelompok pegiat pariwisata dan pemberdayaan masyarakat", ujar Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mendesak pemerintah perlu untuk membatalkan kenaikan harga tiket masuk TN Komodo

dan segera mengkaji Kembali secara utuh terkait skema paket wisata yang menguntungkan semua pihak dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta komitmen pada kegiatan konservasi dalam suatu bentuk payung hukum yang kuat.

"Para pelaku dan pegiat pariwisata labuan bajo harus selalu dilibatkan dan didengar aspirasi mereka agar timbul Kerjasama dan partisipasi demi masa depan pariwisata TN Komodo" tutur Johan.

Terkait pembatasan kuota pengunjung, Johan menilai penerapannya tidak boleh mengurangi akses masyarakat terhadap pariwisata tersebut sehingga perlu dikelola dengan sistem operasional pariwisata yang mempuani.

"Berbagai paket wisata mesti dirancang dengan berbasis data dan ilmu pengetahuan agar pengelolaannya profesional dan tidak tendensius hanya menguntungkan beberapa kelompok bisnis tertentu" tandas Johan.

Wakil Rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah untuk mendengar aspirasi dari para pelaku dan pegiat wisata di Lab-



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya mendorong agar Pemerintah menata kegiatan bisnis pariwisata dan bentuk bisnis lainnya di TN Komodo secara komprehensif dengan berprinsip tetap menjaga kelestarian populasi Komodo, kenyamanan pengunjung dan melibatkan berbagai kelompok pegiat pariwisata dan pemberdayaan masyarakat",

uan Bajo sebab menurutnya skema bisnis dari wisata Komodo ini harus adil dan memberdayakan semua pihak termasuk masyarakat lokal.

"Masyarakat tidak boleh hanya jadi penonton sedangkan kebijakan ini berpotensi

disusupi kepentingan bisnis besar yang juga sering mengabaikan kepentingan konservasi, jadi Pemerintah harus tegas membatalkan kenaikan harga tiket ini demi kepentingan yang lebih luas," demikian tutup Johan Rosihan.



# Dinilai Terlalu Cepat Umumkan Kasus PMK Melandai, Aleg PKS: Fokus Vaksinasi dan Ganti Rugi Saja

## KUTIPAN

Jakarta (02/08) --- Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, Slamet meminta Kementerian Pertanian tidak buru-buru mengklaim terjadi penurunan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di sejumlah Provinsi.

"Pemerintah sebaiknya fokus pada percepatan vaksinasi, pengobatan dan juga pemberian ganti rugi bagi peternak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan soal pelandaian kasus PMK," ujarnya kepada media di Jakarta Selasa (02/08).

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengklaim telah terjadi pelandaian kasus PMK di 22 provinsi. 4 Mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut mengatakan pemerintah pusat sudah merencanakan akan membayar ganti rugi sebesar Rp.10 juta kepada para peternak terkhusus hewan ternak sapi

yang mati akibat terjangkit wabah PMK.

Politisi senior PKS ini meminta semua pihak yang berwenang untuk tidak mengalihkan fokus terhadap penyebaran PMK ini.

"Mengingat beberapa negara tetangga juga sudah memberikan warning bagi Indonesia terkait potensi penyebaran wabah PMK secara global," ujarnya.

Selain itu, Menurut Slamet pemerintah harus mengambil pelajaran terhadap penyebaran PMK ini sebagai acuan peningkatan sistem bio-sekuritas dalam negeri.

"Pemerintah seharusnya tidak boleh lengah hanya karena terjadinya pelandaian data penyebaran PMK, efek PMK ini telah memukul industri peternakan nasional yang disaat bersamaan juga memukul citra Indonesia dimata global," ungkap Slamet.

Dikutip dari berbagai sumber Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan, hingga saat ini belum ada penambahan jumlah provinsi yang tertular penyakit kuku dan mulut (PMK).

Berdasarkan data pemerintah hingga Selasa (26/7/2022), penularan PMK masih berada di 22 provinsi. Meskipun begitu terdapat penambahan dua kota yang tertular PMK yakni Bandar Lampung dan Bengkulu. Sehingga saat ini total terdapat 265 kabupaten/kota yang tertular penyakit tersebut.



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah seharusnya tidak boleh lengah hanya karena terjadinya pelandaian data penyebaran PMK, efek PMK ini telah memukul industri peternakan nasional yang disaat bersamaan juga memukul citra Indonesia dimata global,"

# Aleg PKS: Subsidi Rumah 2022 Harus Tepat Sasaran atasi Backlog

## KUTIPAN

Tasikmalaya (03/08) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat bersyukur karena anggaran subsidi rumah tahun 2022 yang dialokasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih besar dibanding tahun lalu. Diharapkan backlog perumahan di Tanah Air bisa dikurangi.

"Apresiasi untuk Kementerian PUPR yang memberikan subsidi terhadap 222.586 unit rumah di tahun 2022, senilai Rp 23,88 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun 2021, yakni 157.500 unit dengan nilai Rp 16,6 triliun. Upaya tersebut berpotensi mengatasi gap antara jumlah rumah yang ada dan kebutuhan masyarakat saat ini," ujar Politisi asal PKS.

Senada dengan pengamat ekonomi makro, Toriq menyebutkan ada beberapa faktor penyebab backlog perumahan. Pertama, yang sangat krusial adalah basis data (database) yang belum valid. Kedua, yakni kurangnya

penyerapan perumahan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

"Tentang basis data, tentu saja anggaran diperuntukan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Karena keterbatasan penghasilan. Seyogyanya program ini hanya bisa diakses oleh kelompok MBR saja. Namun fakta lapangan, justru tidak demikian. Kelompok Non MBR juga dapat mengaksesnya," tuturnya.

Sedang pada sisi kurangnya penyerapan perumahan, hal ini menurut Toriq disebabkan ketidakmampuan MBR dari sisi pendanaan. Minimnya informasi

dan sosialisasi tentang cara mengakses pinjaman perbankan kepada MBR menjadi kendala utama. Ketidaktahuan kelompok ini menimbulkan pesimisme, bahwa berurusan dengan bank pasti rumit dan sulit.

"Oleh karenanya saya sangat berharap kepada Kementerian PUPR sebagai leading sektor perumahan di Indonesia agar dapat membenahi database. Bekerjasama lah dengan Kementerian atau lembaga yang berurusan dengan hal ini. Sehingga hanya masyarakat yang berhak saja yang bisa mendapatkan rumah subsidi," jelas Toriq.

Berikutnya, menyiapkan kantor layanan khusus yang bertugas mengatasi keterbatasan informasi masyarakat akan akses rumah subsidi.

"Sistem informasi yang dimiliki harus efektif dan menjangkau kepada MBR. Hanya dengan cara ini anggaran pemerintah untuk program perumahan subsidi benar-benar tepat sasaran," tutup Toriq.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

"Pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut. Lalu terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.

Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota,"



# Proyek Kereta Cepat Mangkrak, Aleg PKS: Masih **Sangat Lemah** dalam Perencanaan

## KUTIPAN

Jakarta (29/07) - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah dimulai sejak tahun 2015 meninggalkan beragam masalah. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, angkat suara terkait lambannya proyek tersebut.

"Ini proyek strategi nasional tapi masih sangat lemah dalam perencanaan, seperti lemahnya koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait," ungkap Suryadi secara daring melalui siaran PKS Legislative Corner.

Sejak kelahirannya, imbuh Suryadi, proyek kereta cepat sudah bermasalah. Awalnya dua negara berminat, yaitu Jepang dan China.

"Saat itu Jepang berminat tapi (dalam proposalnya) meminta jaminan dari pemerintah Indonesia dalam hal pembiayaan. China tidak mensyaratkan itu, makanya pemerintah tergiur memilih China," tegas Anggota DPR RI Dapil NTB II ini.

Pada kenyataannya, China justru meminta pertanggung jawaban pemerintah berupa jaminan biaya yang diambil dari APBN.

Suryadi menilai pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut. Lalu terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.

"Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota," kata

Suryadi

Menurut Suryadi, pemerintah membentuk inkonsistensi kebijakan di mana proyek kereta cepat beriringan dengan pembangunan IKN yang sama-sama membutuhkan sumber daya besar.

"Pemerintah seharusnya punya perhitungan matang. Ini bukan (kegagalan) yang pertama. Contohnya Bandara di Sumsel tidak ada pesawat mendarat di sana. Pemerintah juga harus lebih tegas dan kuat serta bernegosiasi ulang dengan China Development Bank dalam menepati janjinya untuk tidak menggunakan dana pemerintah," pungkasnya.



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI

"Pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut. Lalu terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.

Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota,"



*Mari Tetap*  
**Patuhi** Protokol  
*Kesehatan*

# Legislator PKS Tegas Tolak Pembengkakan Biaya KCJB yang Dibiayai APBN

**KUTIPAN**

Surabaya (03/08) -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai cost overrun (pembengkakan biaya) pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Amin pun mewanti-wanti pemerintah jangan sampai masuk dalam perangkap utang yang akan membebani keuangan negara.

Amin menyebut peringatannya didasarkan pada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak proposal proyek disampaikan China medio Agustus 2015 silam. China menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.

"Pada perjalanannya, semua janji China tidak terbukti dan membuat Indonesia terjebak pada dilema, melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan

risiko proyek mangkrak namun tetap membayar utang besar yang sudah terlanjur berjalan," jelas Amin.

Untuk menghentikannya, kata Amin, juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80%.

"Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar 'proyek rugi' tersebut tetap berjalan", beber Amin.

Kejanggalan lain, lanjut Amin, dari sisi bisnis, operasional kereta cepat Jakarta Bandung ini sulit untuk

balik modal. Dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi US\$7,9 miliar dari semula hanya US\$5,13 miliar, secara hitungan bisnis hampir tidak mungkin bisa kembali modal.

"Dari sudut pandang komersial, jangankan bicara untung, operasionalisasinya di masa depan berpotensi membebani keuangan negara," tegasnya.

Selain itu, dikaji dari sisi ekonomi, efek ekonomi proyek ini juga sangat minim dan tidak bersentuhan langsung dengan nilai tambah perekonomian rakyat. Dengan jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat, sulit untuk berharap moda transportasi ini mampu mensubstitusi penggunaan mobil pribadi atau kendaraan travel.

Menurut Amin, situasinya mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari China untuk pembangunan infrastruktur seperti Srilangka dan Pakistan. Karena itu la mewanti-wanti pemerintah agar jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Pada perjalanannya, semua janji China tidak terbukti dan membuat Indonesia terjebak pada dilema, melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak namun tetap membayar utang besar yang sudah terlanjur berjalan

pembengkakan biaya.

"Jangan sampai proyek ini hanya untuk memenuhi ambisi sekelompok orang namun

mengorbankan masa depan rakyat Indonesia dengan beban utang yang sangat besar," pungkasnya.

Harga Batubara Dunia Melesat

# Wakil Ketua FPKS Minta Pemerintah Perketat DMO

**KUTIPAN**

Jakarta (04/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah menaikkan kompensasi ekspor batu bara kepada pengusaha yang tidak atau belum melakukan kontrak kerjasama dengan PLN.

"Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga persediaan batu bara bagi produksi listrik nasional," ujarnya.

Mulyanto menilai sejauh ini pemerintah sulit mewujudkan target DMO karena besaran kompensasi untuk perusahaan yang tidak menjalin kontrak dengan PLN lebih kecil daripada yang sudah melakukan kontrak kerjasama namun ingkar.

"Hal ini dianggap kurang adil dan mendorong pengusaha untuk memilih tidak melakukan kontrak dengan PLN," ungkap Mulyanto.

Berdasarkan aturan saat ini perusahaan yang sudah melakukan kontrak dengan PLN akan mendapat kompensasi sebesar USD 188/ton. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak melakukan kontrak

dengan PLN dikenakan denda hanya sebesar USD 18/ton.

"Pemerintah harus memperberat besaran kompensasi bagi pengusaha yang tidak mau kontrak dengan PLN dan harus bersikap tegas kepada pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO ini. Kalau kompensasinya rendah, mereka lebih pilih bayar kompensasi dari pada mematuhi DMO," kata Mulyanto pada media, Kamis (04/08).

Mulyanto minta Pemerintah segera mengambil kebijakan ini sebelum produksi listrik PLN bermasalah. Sebab harga batu bara global saat ini mencapai USD 400 per ton.

Sementara harga DMO untuk PLN dipatok flat sebesar USD 70 per ton. Disparitas harga yang sangat tinggi ini membuat pengusaha batu bara

lebih suka menjual produksinya ke pasar luar negeri. Sebab dengan volume yang sama bisa mendapat keuntungan lebih dari lima kali lipat.

"Karenanya, kalau Pemerintah tidak bersikap tegas, maka aksi ekspor yang melanggar DMO ini akan menjadi-jadi. Ujung-ujungnya listrik kita padam," imbuh Mulyanto.

Di sisi lain Mulyanto mengingatkan Pemerintah harus konsisten mengembangkan listrik dari sumber EBET (energi baru atau energi terbarukan) sesuai target bauran energi, agar batu bara ini tidak kita bakar di dalam negeri.

"Dengan begitu kita akan dapat dua keuntungan, yakni energi yang lebih bersih dan penerimaan negara yang lebih optimal," jelas Pak Mul.

Untuk diketahui kontribusi sumber batubara pada kelistrikan nasional masih tinggi, di atas 60 persen. Terganggunya pasokan batubara secara langsung akan memperlemah ketahanan energi nasional.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah harus memperberat besaran kompensasi bagi pengusaha yang tidak mau kontrak dengan PLN dan harus bersikap tegas kepada pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO ini. Kalau kompensasinya rendah, mereka lebih pilih bayar kompensasi dari pada mematuhi DMO,"



# Rofik Hananto Minta Revisi Perpres BBM **Harus Perbaiki Distribusi BBM Bersubsidi**

## KUTIPAN

Jakarta (30/07) --- Untuk pengetahuan distribusi BBM bersubsidi, Pemerintah berencana akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto meminta revisi Perpres tersebut harus dapat memperbaiki distribusi BBM yang bersifat penugasan seperti pertalite dan solar bersubsidi.

"Saya belum tahu persis isi revisinya, tetapi bayangan saya, revisi Perpres harus dapat memperbaiki distribusi BBM. Khusus yang sifatnya penugasan seperti pertalite harus lebih tepat sasaran karena volumenya yang terbatas. Demikian juga yang solar bersubsidi," kata politikus PKS tersebut.

Anggota Fraksi PKS DPR RI itu mengatakan, pertalite dan solar merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBK P), di mana distribusinya diatur dan diawasi oleh BPH Migas.

"Khusus untuk stok

pertalite, saat ini memang banyak SPBU yang sering kehabisan stok, hal ini karena terjadinya pergeseran penggunaan BBM dari pertamax ke pertalite. Karena SPBU sering kehabisan stok pertalite, saat stok sudah tersedia, terjadi antrian Panjang kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4," katanya.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah 7 ini menambahkan, adanya panic buying dari masyarakat, juga menjadi salah satu faktornya karena adanya kebijakan Pertamina yang akan mewajibkan pembelian pertalite dengan aplikasi my pertamina per 1 Agustus 2022 untuk kendaraan roda 4.

"Untuk stok solar saat ini di dapil kami aman, ini karena sbilmnya ada penambahan

alokasi subsidi untuk BBM jenis solar," kata Rofik Hananto.

Dia menuturkan, di sisi produksi, kalau dilihat pergerakan harga minyak mentah dunia, khususnya Brent yang jadi acuan biaya pengadaan BBM, trennya memang meningkat. Sejak 24 Februari 2022 ketika Rusia menyerang Ukraina, harga terus berada di level baru yang lebih tinggi.

"Memang terjadi lonjakan sesaat di awal perang dan fluktuatif naik turun selama beberapa bulan, tetapi secara umum tetap bertengger di level yang lebih tinggi dari sebelum perang Rusia-Ukraina," katanya.

Di sisi konsumsi, di dalam negeri, disparitas harga antara pertamax (Rp 12.500 - 12.750) dan pertalite (Rp 7.650) cukup besar, sehingga wajar kalau terjadi pergeseran konsumsi dari pertamax ke pertalite, khususnya bagi warga yang daya belinya masih terbatas.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**H. ROFIK HANANTO, S.E**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Saya belum tahu persis isi revisinya, tetapi bayangan saya, revisi Perpres harus dapat memperbaiki distribusi BBM. Khusus yang sifatnya penugasan seperti pertalite harus lebih tepat sasaran karena volumenya yang terbatas. Demikian juga yang solar bersubsidi,"

## Harga Bahan Pangan Melonjak

# PKS Tuntut pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

Harga sejumlah bahan pokok dan bahan pangan, seperti bawang merah dan cabai, terus meroket.

Kenaikan harga komoditas-komoditas itu menyebabkan tergerusnya daya beli masyarakat.

Secara tahunan, inflasi umum mencapai angka **4,35 persen**, atau sudah lebih besar dari target atau estimasi Pemerintah dan BI yakni sebesar **4,2 persen**.

Hasil Survei Konsumen yang dirilis Bank Indonesia (BI) menyebutkan, **Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)** Juni 2022 berada pada level **128,2** atau menurun dibandingkan Mei 2022 yang berada pada level 128,9

Daging Sapi  
Rp 145.000/kg

Ayam Broiler  
Rp 45.000/kg

Cabai Rawit Besar  
Rp 93.000/kg

Bawang Putih  
Rp 37.000/kg

Cabai Rawit  
Rp 120.000/kg

Bawang Merah  
Rp 70.000/kg

Rawit Merah Keriting  
Rp 100.000/kg

Telur Ayam  
Rp 28.000/kg

# Iskan Qolba Minta Kemenag Pangkas Biaya Haji Indonesia Tahun Depan

**KUTIPAN**

Jakarta (26/07) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 1443 Hijriyah cukup sukses. Namun ada beberapa hal yang sangat penting dalam evaluasi ibadah haji tahun ini.

Saat berbincang dengan Menteri Agama RI dalam rangka pengawasan ibadah haji 1443 Hijriyah di Arafah, Iskan meminta agar biaya penyelenggaraan haji tahun depan bisa dipangkas.

"Saya berharap biaya haji tahun depan bisa ditekan, dengan melakukan nego dari jauh-jauh hari, serta tidak mendadak. Saya akan perjuangkan biaya haji tahun depan bisa turun di angka yang jauh berbeda dengan haji tahun ini," kata Iskan dalam keterangan persnya yang diterima Parlemenaria, Rabu (13/7/2022).

Politisi PKS itu berharap, kuota jemaah haji haji tahun depan dapat ditingkatkan lagi.

"Kemungkinan di tahun depan sesuai dengan yang saya usulkan kepada Menteri Agama, kita memberangkatkan

sebanyak 250 ribu jemaah haji Indonesia. Dalam kesempatan perbincangan ini juga, saya berharap ke depannya agar Kementerian Agama bisa lebih mempersiapkan khususnya terkait kuota haji yang akan ditambah," kata Iskan.

Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian pengawas haji Komisi VIII DPR RI tahun ini, ialah pemondokan jemaah haji yang relatif jauh.

"Padahal banyak gedung bagus yang lebih dekat yang masih kosong tidak disewa Kementerian Agama. Apalagi jatah haji yang datang cuma setengah jemaah sebelum Covid-19," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu.

Kemudian, lanjut Iskan, biaya di Arafah, Mina dan

Muzdalifah yang naik 49 persen tanpa fasilitas yang signifikan juga perlu untuk dievaluasi.

"Khususnya terkait biaya haji untuk tahun depan atau 1444 H, kita perlu membicarakannya kembali dari jauh-jauh hari dan saya menyampaikan ini saat berbincang dengan Pak Menteri Agama di Arafah. Saya usul biaya haji tahun depan bisa lebih dipangkas kembali, agar lebih murah ketimbang biaya haji di tahun ini. Dan saya ingatkan dengan syarat nego jauh-jauh hari serta jangan mendadak," tegas Iskan.

Iskan menyampaikan, catatan terkait biaya dan kuota juga akan dibahas dengan Menteri Agama.

"Kita dapat menambah kuota untuk keberangkatan haji di tahun depan dengan semaksimal mungkin. Harapan kita semua tahun depan sudah normal semuanya, khususnya terkait untuk kuota jemaah haji Indonesia. Semoga apa yang kita rencanakan, jauh-jauh hari dapat terealisasi dengan baik. Harapan saya, Menteri Agama dapat mendengarkan usulan ini dan dapat direalisasikan untuk Haji 1444 Hijriyah," harapnya

**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**

Dapil Sumatera Utara II

"Kemungkinan di tahun depan sesuai dengan yang saya usulkan kepada Menteri Agama, kita memberangkatkan sebanyak 250 ribu jemaah haji Indonesia. Dalam kesempatan perbincangan ini juga, saya berharap ke depannya agar Kementerian Agama bisa lebih mempersiapkan khususnya terkait kuota haji yang akan ditambah,"



# Bukhori Usul Materi Ajar Anti Kekerasan Masuk dalam Kurikulum Sekolah

## KUTIPAN

Jakarta (30/07) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf angkat bicara mengenai kasus perundungan anak di Tasikmalaya yang menyebabkan meninggalnya korban.

Bukhori mendukung aparat penegak hukum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan dengan memproses hukum para pelaku secara adil.

"Walaupun proses hukum ditegakan, kami memandang penanganan kasus perundungan-an terhadap anak tidak bisa hanya mengedepankan pendekatan hukum. Sebab penegakan hukum belum tentu memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan apabila masalah perundungan terhadap anak tidak diselesaikan sejak dari hulunya," kata Bukhori di Jakarta, Selasa (27/7/2022).

Politisi PKS ini mengaku resah dengan fenomena kekerasan terhadap anak yang mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020.

Dalam catatannya, pada

tahun 2020 sebanyak 12.389 anak dilaporkan menjadi korban kekerasan. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan sehingga menjadi 15.280 anak. Sementara, hingga bulan Juli 2022 sebanyak 7.566 anak dilaporkan menjadi korban kekerasan.

Anggota DPR yang membidangi isu perlindungan anak ini mengusulkan materi anti kekerasan masuk di dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga menengah.

Bukhori menilai penanganan terhadap isu kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh teman sepegalannya perlu ditangani sejak dari hulunya dan dilaksanakan secara sistematis.

"Sekolah sebagai institusi sosial dan pendidikan memiliki peran vital untuk memahamkan

peserta didik terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sebab tugas sekolah tidak hanya mendidik anak supaya menjadi pintar, tetapi juga membentuk kepribadian siswa yang memiliki adab dan empati terhadap sesama," ucap Bukhori.

Anggota Badan Legislasi ini melanjutkan, mengarusutamakan nilai dan norma anti kekerasan sehingga dapat terinternalisasi dalam pola pikir dan perilaku peserta didik dapat terselenggara secara sistematis melalui model pendidikan formal.

"Gagasan ini sejalan dengan amanat Presiden untuk menghapus kekerasan terhadap anak yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak," jelasnya.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dari isu ini, demikian Bukhori, lebih tepat jika materi anti kekerasan ini dibuat dalam satu mata pelajaran tersendiri yang disesuaikan dengan rentang usia peserta didik dan dilaksanakan secara berjenjang.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Amanat Perpres menekankan strategi penghapusan kekerasan terhadap anak perlu dilakukan lintas sektor. Dengan demikian, penyusunan bahan ajar mesti melibatkan instansi lain di luar instansi pendidikan semisal instansi yang bergerak di perlindungan anak, penegak hukum, instansi sosial dan kesehatan, serta instansi terkait lainnya sehingga melahirkan bahan ajar yang komprehensif

# Kemensos Gandeng PPAATK untuk Satgas Filantropi, HNW: **Penting** Ajak Kemen-PPPA Juga

## KUTIPAN

Jakarta (29/07) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menggandeng PPAATK.

Tapi Hidayat menyarankan, agar lebih maksimal maka mestinya Kemensos juga menggandeng Kementerian PPPA dalam rencana pembentukan satuan tugas untuk memantau aktivitas lembaga filantropis di Indonesia.

HNW sapaan akrabnya menilai hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan adanya prioritas penyaluran bantuan yang dikumpulkan oleh aktivis filantropi, agar berkontribusi nyata untuk ikut menyelesaikan beragam permasalahan pada anak yang semakin marak terjadi.

"Mensos pada 28 Juli kemarin sampaikan akan membentuk satgas filantropi dengan menggandeng PPAATK. Itu baik saja. Tapi menurut

kami, berdasarkan fakta di lapangan, selain PPAATK, KemenPPPA juga harusnya dilibatkan dalam satgas, sehingga dapat memaksimalkan potensi dan manfaat penyaluran donasi dari lembaga filantropis khususnya untuk berbagai program penanggulangan dan penyelesaian kekerasan pada anak," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/07).

Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, pada tahun 2022 Kementerian PPPA yang tupoksinya sangat besar karena terkait dengan perlindungan Perempuan dan pemberdayaan Anak di seluruh Indonesia, hanya memperoleh anggaran

Rp 252,6 Miliar, dimana anggaran untuk program perempuan dan anak malah hanya Rp 95,8 Miliar.

"Angka tersebut bahkan jauh lebih kecil dari anggaran yang diterima sebuah Ditjen di Kemensos, seperti Ditjen Pemberdayaan Sosial misalnya yang memiliki anggaran Rp 413,8 Miliar," sebut Anggota Komisi VIII yang membidangi persoalan sosial ini.

Padahal disaat yang sama, imbuhan HNW, angka kekerasan terhadap anak terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data KemenPPPA, pada tahun 2016 terdapat korban kekerasan sejumlah 7.879 anak per tahun, lalu meningkat menjadi 10.770 anak pada tahun 2020. Di tahun 2022, hingga akhir Juli ini saja, sudah tercatat korban kekerasan anak mencapai 7.546 orang.

"Masalah kekerasan pada anak semakin meningkat dan mengkhawatirkan, baik karena bullying, kekerasan seksual, bahkan hingga ada yang meninggal seperti di Tasikmalaya (18/7), namun KemenPPPA sangat tidak



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Masalah kekerasan pada anak semakin meningkat dan mengkhawatirkan, baik karena bullying, kekerasan seksual, bahkan hingga ada yang meninggal seperti di Tasikmalaya (18/7), namun KemenPPPA sangat tidak memiliki kecukupan anggaran untuk bisa menyelesaikannya.

memiliki kecukupan anggaran untuk bisa menyelesaikannya. Maka kami dorong satgas filantropi yang akan dibentuk oleh Mensos, juga turut melibatkan KemenPPPA, bahkan mungkin menetapkan

persentase tertentu dari penyaluran lembaga filantropis untuk program perlindungan anak," lanjutnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atakrif Substantif*



Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada generasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.

# Politisi PKS Ingatkan Pemerintah **Jangan Lagi Terlambat** Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

## KUTIPAN

Jakarta (25/07) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan tata laksana antisipasi penyakit cacar monyet (Monkeypox) di Indonesia.

Meski belum terdeteksi cacar monyet masuk ke Indonesia, Kurniasih mengingatkan agar pemerintah belajar dari penanganan pandemi Covid-19 saat masuk ke Indonesia.

Saat ini cacar monyet ditetapkan oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau status darurat kesehatan global yang memerlukan kerjasama antar negara untuk proses penanganan dan pencegahan.

"Kita harus belajar dari penanganan Covid 19 sehingga seharusnya lebih siap mengantisipasi penyakit yang menjadi perhatian dunia internasional. Kemenkes harus sudah memiliki tata laksana

standar penanganan untuk mencegah sekaligus jika ada kasus monkeypox di Indonesia," sebut Kurniasih dalam keterangannya, Senin (25/07).

Status darurat kesehatan global diterapkan sebagai antisipasi persiapan seluruh negara, sebab penyakit ini memungkinkan menular baik dari hewan maupun antar manusia lewat perjalanan global.

Lewat status darurat kesehatan global, Indonesia juga harus menyiapkan diri meski kasus belum ada. Kurniasih menegaskan, tata laksana sebagai panduan standar di seluruh Indonesia harus berisi setidaknya dari program antisipasi, kemampuan diagnosa, ketersediaan vaksin,

pelacakan kontak erat dan jika terjadi lonjakan kesehatan.

"Skenario ini harus sudah ada dan disiapkan sebagai tata laksana resmi di bawah Kemenkes. Kita harus lebih responsif belajar dari pandemi Covid-19 jika muncul potensi persebaran penyakit baru yang bisa cepat menyebar secara internasional. Penanganan kita harus lebih dini dan baik dan tidak gagap meski kita juga tidak berharap penyakit ini masuk ke Indonesia," sebut Kurniasih.

Kemenkes sudah membuat informasi terkait penyakit cacar monyet dan harus disebarkan dengan cara-cara yang mudah dipahami publik.

"Hingga hari ini belum ditemukan kasus cacar monyet di Indonesia dan perlu langkah edukasi sosialisasi dengan cara yang lebih mudah dipahami publik agar cepat memahami dan bisa melakukan tindakan pencegahan dengan terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan tetap menerapkan protokol Kesehatan," kata Kurniasih.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Kita harus belajar dari penanganan Covid 19 sehingga seharusnya lebih siap mengantisipasi penyakit yang menjadi perhatian dunia internasional. Kemenkes harus sudah memiliki tata laksana standar penanganan untuk mencegah sekaligus jika ada kasus monkeypox di Indonesia,"

# Wakil Ketua FPKS Minta 60 WNI di Kamboja **Segera Dibebaskan**

## KUTIPAN

Jakarta (01/08) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta pemerintah bergerak cepat membebaskan 60 WNI yang disekap di Kamboja.

"Pemerintah harus mendesak dan mendorong Pemerintah Kamboja untuk segera melakukan operasi pembebasan. Jangan tunggu lebih lama lagi. Kalau tidak segera dibebaskan kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap mereka," kata Netty dalam keterangan mediannya Sabtu (30/07/2022).

Netty khawatir jika tak segera dibebaskan, maka dapat berdampak buruk terhadap keselamatan 60 WNI.

"Sampai saat ini kita juga belum bisa mengidentifikasi siapa saja 60 WNI tersebut. Apalagi ada dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tentunya sulit memastikan keamanan

mereka," terangnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga berharap pemerintah segera menangkan sindikat penyalurnya di dalam negeri.

"Perlu diingat bahwa kasus ini bukan kasus pertamakali. Tahun 2022 ini saja sudah ada 291 WNI yang menjadi korban. Kasus ini jangan hanya berhenti pada pembebasan WNI yang menjadi korban, namun juga harus memberantas jaringan dan calo-calonya di Indonesia" tandasnya.



**Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Pemerintah harus mendesak dan mendorong Pemerintah Kamboja untuk segera melakukan operasi pembebasan. Jangan tunggu lebih lama lagi. Kalau tidak segera dibebaskan kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap mereka, "



# Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Aleg PKS Minta BI Cermat **Pantau** **Perkembangan Global** dan **Kondisi Ekonomi Domestik**

## KUTIPAN

Jakarta (26/07) — Bank Dunia, dalam laporannya *Global Economic Prospects* edisi Juni 2022, merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% pada tahun 2022. Angka itu lebih rendah 1,2 persen dari proyeksi edisi Januari 2022 yang sebesar 4,1%.

Pada situs resminya Bank Indonesia memperkirakan, ketidakpastian ekonomi global diprakirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan, yang ditempuh oleh berbagai negara ([bi.go.id/Juni2022](https://bi.go.id/Juni2022)).

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Juli 2022, memutuskan

untuk mempertahankan suku bunga acuan. BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tetap sebesar 3,50 persen, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 4,25 persen.

Merespon hal ini, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, memberikan beberapa catatannya. Pada Senin (25/7/2022), Anis menyampaikan bahwa Bank Indonesia harus cermat melihat perkembangan global dan

kondisi ekonomi domestik karena ketidakpastian masih sangat tinggi.

"Tren perkembangan inflasi dan depresiasi rupiah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan suku bunga acuan karena dampaknya langsung dirasakan bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Politisi senior PKS ini mengingatkan BI untuk terus mengamati kebijakan Bank sentral Amerika Serikat The Fed yang sudah menaikkan suku bunga sampai 150 bps (basis point) hingga saat ini.

Kebijakan ini untuk merespons angka inflasi Amerika Serikat yang menembus 9,1 persen pada Juni 2022, tertinggi dalam empat dekade terakhir.

BI juga harus mempertimbangkan kondisi stagflasi yang sedang melanda perekonomian global dan imbasnya sampai ke Indonesia. Risiko dampak perlambatan ekonomi global dan inflasi yang tinggi sewaktu-waktu bisa mengancam



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

"Tren perkembangan inflasi dan depresiasi rupiah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan suku bunga acuan karena dampaknya langsung dirasakan bagi perekonomian nasional

pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"BI harus terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan. Perkembangan inflasi sampai semester I tahun 2022 menunjukkan ada kenaikan inflasi pada Volatile Food dan Administered Price," tutur Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menganggap Langkah-

langkah yang diambil BI sudah tepat. BI tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek suku bunga acuan semata. Tetapi juga melakukan bauran instrumen kebijakan dalam menghadaipi kondisi saat ini. Baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**

# Cina Menekan APBN, Banggar FPKS Minta Pemerintah **Tak Serta** **Merta Penuhi**

## KUTIPAN

Padang (01/08) --- Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto meminta Pemerintah agar tidak serta merta memenuhi keinginan Cina yang meminta APBN menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Hermanto menilai Cina sudah masuk masalah yang sensitif soal kedaulatan Indonesia dalam kebijakan APBN.

"Indonesia negara berdaulat, upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi. Jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerjasama," tandas Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (01/08).

Dalam hal ini, kata Hermanto, Pemerintah juga jangan bertindak sendiri.

"Perhatikan mekanisme di DPR sebagai lembaga yang

berfungsi budgeting negara dalam mengalokasikan anggaran," ujar Hermanto.

Hermanto mengingatkan Pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB itu berdasarkan kesepakatan B to B bukan G to G.

"Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN. Bila terjadi resiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya," papar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Saat ini, ungkap Hermanto, Indonesia sedang menghadapi masalah anggaran dan

ekonomi dalam negeri. Dalam kondisi susah ini tiba-tiba ada permintaan agar pembengkakan biaya pembangunan KCJB dibebankan pada APBN.

"Sepertinya ini proyek ada hidden agenda. Awalnya murah tetapi kemudian membengkak," ucapnya.

Sebelumnya ramai diberitakan, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB.

Hal ini karena terjadi kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek KCJB tersebut. Proyek tersebut mengalami cost overrun 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun.

Hermanto berpendapat, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan memberantas kemiskinan jauh lebih penting.

"Karena itu, mestinya APBN sepenuhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**  
Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN. Bila terjadi resiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya,"



# Terus Silaturahmi, Aus Hidayat Nur **Kenalkan** Sosok Dr. Salim pada Tokoh Agama dan Masyarakat

KUTIPAN

Balikpapan (06/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur terus berkeliling Kalimantan Timur yang merupakan daerah pemilihannya.

Selain bertemu masyarakat guna mendengarkan aspirasi, Aus Hidayat Nur juga bertemu sejumlah tokoh untuk mengenalkan sosok Habib Dr. Salim, selaku Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kita terus mengenalkan sosok Habib Doktor Salim kepada masyarakat. Karena kita ingin seluruh masyarakat turut memiliki sosok beliau, sebagai panutan dan tokoh pemimpin nasional. Karena secara kebangsaan, Doktor Salim merupakan cucu dari pahlawan asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu cucu Guru Tua atau yang dikenal SIS Al Jufri. Dan secara keagamaan, karena masyarakat kita ini masyarakat beragama, Doktor Salim ini merupakan Habib keturunan Rasulullah. Jadi beliau istimewa

bagi masyarakat Indonesia secara kebangsaan maupun keagamaan," jelas Kang Aus, sapaan akrabnya.

Sejumlah tokoh telah ditemuinya. Baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dari beragam kalangan. Mereka berada di berbagai kota atau kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.

Salah satu yang baru di kunjunginya adalah tokoh agama di Berau, yaitu Najmuddin.

"PKS hari ini dikenal masyarakat dipimpin oleh Habaib. Karena Ketua Majelis Syuro-nya adalah Habib Doktor Salim Segaf al Jufri. Beliau ini luar biasa, karena juga merupakan Wakil Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional," ungkapnya kepada Haji Najmuddin, Rabu

(27/07/2022).

Dalam kesempatan lain, saat bertemu dengan mantan Sekda Berau H. Ibnu Sina, Aus Hidayat Nur pun menceritakan berbagai pengalaman Dr. Salim di pemerintahan.

"Doktor Salim pernah menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman, lalu beliau pernah menjadi Menteri Sosial di era SBY. Karena PKS pernah di pemerintahan, saat itu bersama Partai Demokrat," ujarnya.

Masyarakat Kalimantan Timur dikenal sangat mencintai ulama dan habaib. Banyak pesantren tumbuh di tengah-tengah masyarakatnya. Maka mereka pun merespon sosok Dr. Salim dengan penuh sambutan hangat.

"Kita ingin partai Islam ini menang, para tokohnya dengan pemahaman agama yang baik bisa memimpin," tegas seorang ustaz di Pondok Pesantren Nurul Musthofa, Sambaja - Kutai Kartanegara saat menerima kunjungan Anggota DPR RI tersebut.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"PKS hari ini dikenal masyarakat dipimpin oleh Habaib. Karena Ketua Majelis Syuro-nya adalah Habib Doktor Salim Segaf al Jufri. Beliau ini luar biasa, karena juga merupakan Wakil Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional"



# Hadiri Forum OSIS di Dapil Diah Nurwitasari Motivasi Siswa Aktif Organisasi

## KUTIPAN

Kabupaten Bandung Barat (01/08) ---  
Hadir dalam Meet & Great pengurus OSIS  
se kabupaten Bandung Barat yang  
tergabung dalam Forum Osis Bandung  
Barat bertempat di SMA Cisarua (30/07),

Diah Nurwitasari, Anggota DPR RI dari Dapil Kab Bandung dan KBB dengan semangat memotivasi peserta untuk mencapai sukses belajar untuk sukses hidup di masa depan.

Diah dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya selama sekolah hingga bisa mendapatkan beasiswa kuliah ke Jerman.

Aleg DPR RI Komisi VII tersebut membagikan tips dan trik mengenai kesuksesnya tidak terlepas dari pengalaman aktif di organisasi.

"Saya bisa katakan bahwa saya hari ini adalah hasil dari pengalaman saya dulu di organisasi saat masa sekolah," ujar Diah

Diah juga menekankan, bahwa prinsipnya tidak boleh

ada yg menjadi korban antara Organisasi dan prestasi.

"Saya mengakui pada saat sekolah termasuk biasa-biasa dalam prestasi belajar tapi tidak pernah lebih dari ranking 10," ungkapnya.

Aleg DPR RI lulusan Jerman tersebut memotivasi siswa untuk memaksimalkan waktu selama sekolah untuk juga belajar berorganisasi.

"Saya berpesan kepada peserta Meet & Great untuk terus berkiprah dalam berorganisasi dengan pandai mengatur waktu sehingga tetap berprestasi," ujar Diah mengakhiri.



Dipl.Ing. Hj. **DAH  
NURWITASARI**, M. I. POL.  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Saya bisa katakan bahwa saya hari ini adalah hasil dari pengalaman saya dulu di organisasi saat masa sekolah.

Diah juga menekankan, bahwa prinsipnya tidak boleh ada yg menjadi korban antara Organisasi dan prestasi. Saya mengakui pada saat sekolah termasuk biasa-biasa dalam prestasi belajar tapi tidak pernah lebih dari ranking 10,"



Melemahnya nilai tukar rupiah

# PKS Minta Pemerintah Cegah Bahaya Inflasi Dan Resesi



Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS konsisten melemah dalam sebulan terakhir.

Nilai rupiah pada awal Juli sampai 20 Juli 2022, konsisten berada di angka

**15RB** per Dolar AS



## DAMPAK NEGATIF

**Risiko investasi** dan potensi inflasi akan terus meningkat.

Akan memangkas daya beli masyarakat, sehingga menahan konsumsi dan melemahkan daya beli masyarakat.

Menurut lembaga Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, **pelemahan Rupiah terjadi karena semakin sempitnya selisih antara suku bunga acuan Indonesia dengan AS.**

Sebab, keputusan BI dalam menahan suku bunga acuan di 3,5% menahan masuknya modal asing, bahkan cenderung mendorong modal asing keluar dari Indonesia dan menekan Rupiah.



# Aleg PKS Hadiri Serah Terima Program P3TGAI di Dapil

## KUTIPAN

Tasikmalaya (25/07) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat berkeyakinan bahwa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan di Kelurahan Parakasanyag dapat mengoptimalkan pasokan air yang bersumber dari irigasi Sukamandi.

"Pendistribusian air irigasi yang baik adalah ketika setiap pengguna, baik petani hortikultura, ternak maupun perikanan mendapatkan aliran air secara adil dan merata. Kalau sistem tata guna air tidak dipelihara dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi komplik antar petani. Dan ini tidak boleh terjadi," ujarnya.

Hal diatas disampaikan oleh Politisi PKS asal dapil Kokab Tasikmaya dan Kabupaten Garut ketika menghadiri acara serah terima program P3TGAI dan Tahun 2021 - 2022 Kementerian

PUPR pada sabtu kemarin (23/07/2022). Hadir, Kepala Balai Sungai Citanduy, Bambang Hidayah yang mewakili Kementerian PUPR.

Toriq menambahkan ketika terjadi musim kemarau beberapa waktu lalu. Ada beberapa petani yang mencari air dengan cara penggal-memenggal saluran irigasi primer dan sekunder. masing-masing dengan seenaknya mengatur kebutuhan air untuk mengairi lahan persawahan miliknya sendiri tanpa menghiraukan yang lain. "Alhamdulillah, Kami dari PKS hadir membantu aspirasi

warga kelurahan Parakasanyag dan menyampaikannya ke Kementerian PUPR. Hasilnya, hari ini dilakukan serah terima program dari kementerian. Dan diterima oleh sekretaris lurah serta disaksikan oleh para tokoh dan utusan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)," tuturnya.

Toriq berharap kepada semua kelompok P3A yang ada di Kecamatan Indihyang untuk selalu menjaga tali silaturahmi.

"Khusus kelompok tani di Kelurahan Parakasanyag, saya meminta saluran irigasi yang telah ditingkatkan oleh Kementrian PUPR ini agar menjadi tanggungjawab bersama. Baik dalam hal pengawasan dan pemeliharannya," ungkap Toriq mengakhiri.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Alhamdulillah, Kami dari PKS hadir membantu aspirasi warga kelurahan Parakasanyag dan menyampaikannya ke Kementerian PUPR. Hasilnya, hari ini dilakukan serah terima program dari kementerian. Dan diterima oleh sekretaris lurah serta disaksikan oleh para tokoh dan utusan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),"



Reses Bersama Kepala  
Badan Penyuluh Pertanian,

## Rofik Ajak Optimalkan Program Konkrit

### KUTIPAN

Purbalingga (03/08) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto melakukan reses bersama Koordinator Penyuluh Pertanian, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan, Admin Alsintan Kecamatan se Kabupaten Purbalingga di Rumah Makan Noni Purbalingga, Selasa (02/08/2022).

paket konverter kit untuk para petani sasaran di Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

"Total ada 2.240 paket konverter kit yang sudah saya bantu advokasi untuk para petani sasaran di Dapil," kata Rofik

Rofik menambahkan, sebagai anggota Komisi 7 DPR RI dirinya memang bisa memberikan bantuan kepada petani berupa konverter kit. Karena itu dia berharap program ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Saya senang sekali prog-

ram itu bisa gayung bersambut dengan para penyuluh dan Dinas Pertanian," katanya

Dia menuturkan, tahun lalu Kabupaten Purbalingga mengajukan proyek 7 Daerah Irigasi (DI) ke pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, dari 7 DI itu saya berhasil 5 DI. Saya berusaha membantu Pemkab Purbalingga karena Purbalingga itu tanah kelahiran saya," tuturnya.

Selain itu, Rofik juga perhatian dengan infrastruktur. "Jalur Panican-Kedungbenda yang dibeton adalah aspirasi

saya. Demikian pula dengan perbaikan Panican-Kemojing dan Kutabawa-Goa Lawa juga aspirasi saya," katanya.

Menurut Rofik, salah satu sumpah sebagai anggota DPR RI adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil). Karenanya dia terus memperjuangkan aspirasi dari Dapil 7 yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

"Sekarang beberapa program dengan Dinas Pertanian agar dioptimalkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Rofik dalam kegiatan yang juga dihadiri anggota Komisi 2 dari Fraksi PKS DPRD Purbalingga Cahyo Susilo itu.

Kepala Dinas Pertanian Purbalingga Mukodam mengatakan, program konverter kit adalah pompa air berbahan bakar gas. Konversi BBM ke BBG.

"Terima kasih kepada Bapak Rofik Hananto yang sudah bisa mengupayakan untuk petani di Purbalingga," katanya.

Dia menambahkan, tahun pertama Purbalingga mendapat 171 paket konverter kit, tahun kedua 169 paket, dan tahun ini sebanyak 605 paket. Jika 1 paket senilai Rp 5 juta maka tahun ini Purbalingga mendapat alokasi APBN Rp 3 miliar lebih dalam bentuk konverter kit.



### H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Salah satu sumpah sebagai anggota DPR RI adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil). Karenanya dia terus memperjuangkan aspirasi dari Dapil 7 yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Sekarang beberapa program dengan Dinas Pertanian agar dioptimalkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya

# Saat Reses, Kurniasih Paparkan Pentingnya Perempuan Berkemajuan Bagi Aktivistis Mahasiswa IMMawati

## KUTIPAN

Jakarta (05/08) --- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati didapuk sebagai pembicara Studium Generale Diskusi Nasional yang digelar PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cirendeu, di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (04/08/2022).

Dosen FISIP UMJ ini menyampaikannya paparan tentang 'Manifesto Kepemimpinan IMMawati Mewujudkan Gerakan Perempuan Berkemajuan'.

Kurniasih mengawali diskusi dengan menentang peranan penting perempuan dalam peradaban Islam.

Saat ini umat Islam tengah memasuki momen tahun baru Hijriyah yang terinspirasi dari gerakan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Pada proses hijrah tersebut, ungkap

Kurniasih, ada peran besar perempuan di dalamnya.

"Jadi pada momen hijrah contohnya, ada peran besar perempuan di dalamnya. Ada Asma binti Abu Bakar yang menyiapkan perbekalan bagi Nabi SAW dan Abu Bakar dengan sembunyi-sembunyi. Ada Ruqayyah Binti Rasulullah SAW yang dua kali hijrah demi menyelamatkan iman, ada Ruqaiqah binti Shaif bin Hasyim yang memberikan info rencana pencetakan hijrah kepada Nabi SAW," ungkap dia.

Sebab itu, bagi aktivis IMMawati harus yakin bahwa gerakan Perempuan Berkemajuan akan memberikan andil besar dalam kehidupan berbangsa ini sebagaimana peran strategis perempuan dalam sejarah.

Kurniasih berpesan, perempuan berkemajuan adalah perempuan yang alam pikiran dan kondisi kehidupannya maju tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi secara struktural ataupun kultural.

"Perempuan yang mampu mengaktualisasikan keimanan, ketakwaannya kepada Allah swt, serta pengamalan amal salehnya dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya secara luasa, baik di ruang domestik maupun publik. Ini maknanya dalam sekali," ungkap Kurniasih.

Sebab itu Aktivitas Mahasiswa IMMawati harus segera mengambil peran besar tersebut. Ada peluang besar saat ini ketika Perempuan Indonesia diberikan ruang yang sangat



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Perempuan yang mampu mengaktualisasikan keimanan, ketakwaannya kepada Allah swt, serta pengamalan amal salehnya dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya secara luasa, baik di ruang domestik maupun publik. Ini maknanya dalam sekali,"

luas untuk mengekspresikan pemikiran dan karyanya tanpa banyak hambatan.

"Perempuan Indonesia bisa berperan maksimal di bidang politik seperti di DPR

atau di pemerintahan, ekonomi, sosial kemanusiaan, akademik dan juga agama," terang Kurniasih.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Semarakkan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 Johan **Buka** Turnamen Bola Mini di Kelurahan Lempeh

## KUTIPAN

Sumbawa (06/08) -- Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Sumbawa Fraksi PKS, Johan Rosihan membuka secara resmi turnamen bola mini antar RT/RW di Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa Jum'at sore (05/ 08/2022).

Dalam sambutannya, Politisi yang kerap disapa JR itu sangat senang dengan adanya kegiatan tersebut. Ia berpesan bahwasannya bulan kemerdekaan tak harus diisi dengan kegiatan-kegiatan berskala besar, sebab yang terpenting adalah esensi dari kegiatan tersebut.

"Ini kegiatan yang sangat positif dan luar biasa. Bulan kemerdekaan tak perlu kita isi dengan hal-hal yang besar, cukup dengan kegiatan sederhana seperti ini yang terpenting jelas esensinya yakni mempererat tali persaudaraan diantara kita dan yang terpenting lagi ikut

menyemarakkan bulan kemerdekaan."

Demikian kata Johan kepada media ini. Ia bahkan berkomitmen untuk terus mensupport kegiatan-kegiatan lain jika dirasa perlu dilaksanakan kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya.

Lurah Lempeh, yang turut hadir juga dalam kegiatan itu menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam atas kehadiran dan suport dari Politisi asal Sumbawa tersebut.

"Kami selaku pemerintah kelurahan lempeh menyampaikan terimakasih kepada Pak Johan karena telah

membersamai kami dalam kegiatan ini. Beliau biasanya hanya kami lihat di televisi, atau media-media, tapi luar biasa sore ini beliau bisa menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di tempat ini."

Demikian kata Deni, sapaan akrabnya yang langsung diikuti tepuk tangan dari para peserta, masyarakat, juga para panitia. Dini juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, ia juga tengah bersiap untuk mengadakan event bola voli se-Pulau Sumbawa.

Tak lupa ia juga meminta dukungan serta suport dari politisi PKS itu pada setiap event-event yang akan datang yang rencananya digelar di Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa.

Dalam kegiatan yang digelar sore hari tersebut, turut hadir juga Camat Sumbawa, dan beberapa tokoh masyarakat.



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

"Ini kegiatan yang sangat positif dan luar biasa. Bulan kemerdekaan tak perlu kita isi dengan hal-hal yang besar, cukup dengan kegiatan sederhana seperti ini yang terpenting jelas esensinya yakni mempererat tali persaudaraan diantara kita dan yang terpenting lagi ikut menyemarakkan bulan kemerdekaan."

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atrokratif Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internships)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

# Saat Reses di Dapil, Mustafa Kamal **Dorong** Pengarurusan Ekonomi Kreatif bagi UMKM

## KUTIPAN

Palembang (06/08) — Sejumlah pelaku UMKM di kota Palembang, Sumatera Selatan, mengikuti Sosialisasi UU No 24 tentang Ekonomi Kreatif dalam rangka pengarusutamaan sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian Indonesia.

Sosialisasi UU Ekonomi Kreatif tersebut disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, serta Dinas Pariwisata Kota Palembang, yang digelar di Hotel Santika Palembang, 5 Agustus 2022.

Dalam kegiatan ini, Mustafa Kamal menyampaikan bahwa pemerintah perlu mendorong pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pengarurusan Ekonomi Kreatif menjadi hal yang penting. Ketika kita unggul dalam sektor ini, maka secara

tidak langsung akan mendorong perekonomian, kemandirian bangsa dan akan menjadi kiblat (trendsetter) dunia", ungkap Mustafa.

Selain itu, Mustafa Kamal juga mendorong para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di kota Palembang untuk bekerjasama dalam memasuki era ekonomi digital saat ini.

"Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di era digital saat ini, para pelaku UMKM penting untuk melakukan kolaborasi. Hal ini bertujuan agar para UMKM bisa tumbuh bersama dan saling membantu dalam aktifitas ekonomi yang dilakukan di

lapangan," jelas Mustafa.

Mustafa Kamal juga menyarankan para UMKM agar memanfaatkan teknologi informasi dalam praktik bisnisnya di lapangan.

"Dalam era digital saat ini, para pelaku ekonomi kreatif harus memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk mempromosikan dan memaksimalkan penjualan produknya", tandas Mustafa.

Dalam kegiatan Sosialisasi UU No 24 tentang Ekonomi Kreatif yang disampaikan Anggota DPR RI Komisi X Mustafa Kamal, hadir juga Selliane Halia Ishak, selaku Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, serta Sulaiman Amin, sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.



## H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Selatan I

"Pemerintah perlu mendorong pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengarusutamaan Ekonomi Kreatif menjadi hal yang penting. Ketika kita unggul dalam sektor ini, maka secara tidak langsung akan mendorong perekonomian, kemandirian bangsa dan akan menjadi kiblat (trendsetter) dunia"

# Wisuda Sanggar Al-Qur'an di Jakarta HNW Ajak Wisudawan Hadirkan Generasi Rahmatan Lil Alamin

## KUTIPAN

Jakarta (27/07) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kegiatan wisuda Sanggar Al Quran Mardani Lima di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Hidayat juga berharap semoga dapat semakin meningkatkan kualitas peserta program Al-Qur'an dan masyarakat di sekitarnya.

"Wisuda 256 santriwan dan santriwati dari Sanggar Al Qur'an ini diselenggarakan di Jakarta, di kota metropolitan, kota global, yang modern dan kadang-kadang kerap dicirikan tidak berkaitan dengan spiritualitas. Tetapi justru disini di Johar Baru, Jakarta Pusat, hadir sanggar Al Quran Mardani Lima yang terus bertambah banyak jumlah pesertanya, bahkan sudah mulai membangun markas untuk pusat kegiatannya. Ini menandakan sanggar Al-Qur'an sangat diterima oleh masyarakat, tentu karena kualitas dan manfaatnya,"

ujarnya dalam kegiatan wisuda santri/santriwati Sanggar Al-Qur'an Mardani Lima, Ahad, (26/07/2022).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa di tengah kota Jakarta ini, kehadiran Sanggar Al Qur'an perlu diapresiasi agar menjadi sarana berkontribusi menghadirkan solusi atas masalah kemasyarakatan di Johar Baru, yang sering diidentikkan dengan tawuran dan narkoba. Agar kegiatan terkait Al-Qur'an baik dengan tahsin maupun tahfid nya dapat sebarakan kebaikan baik terhadap peserta, keluarganya dan lingkungan masyarakatnya.

"Kegiatan dan Lembaga ini merupakan cerminan Al-Qur'an yang menjadi sumber dan inspirasi kebaikan yang menjadi

sarana kontribusi bagi berlakunya amal sholih bagi komunitas setempat," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa kegiatan Sanggar Al Qur'an Mardani Lima yang positif seperti ini, penting terus didukung oleh Warga, agar terus membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengokohkan alternatif kegiatan yang menarik dan konstruktif, sehingga dapat menjauhi kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, seperti anti sosial, ekstrimisme, terorisme dan radikalisme.

"Dengan Sanggar Al Qur'an ini diharapkan dapat menghadirkan sikap hidup yang positif, maju, moderat dan saling tolong menolong sesuai ajaran Al Quran," tukasnya.

HNW juga berpesan agar para santri wisudawan/wisudawati Sanggar Al Quran agar tetap terus menghadirkan keunggulan Al Quran dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan berprofesi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Kegiatan dan Lembaga ini merupakan cerminan Al-Qur'an yang menjadi sumber dan inspirasi kebaikan yang menjadi sarana kontribusi bagi berlakunya amal sholih bagi komunitas setempat,"



# Syahrul Aidi: SPAM IKK Suram Diharapkan Atasi Krisis Air Bersih di Tapung Hulu

## KUTIPAN

Kampar (25/07) — Untuk mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Tapung Hulu, pemerintah membangun Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Desa Suka Ramai.

Pembangunan SPAM IKK Suram ini berkat dana aspirasi dari Anggota DPR RI Dapil Riau II, Syahrul Aidi Maazat. Peresmian pembangunan dimulai pada Jumat (22/7/2022) lalu.

Hadir pada saat pembangunan Syahrul Aidi Maazat, Kepala BPPW Riau, Abdul Khalil Kastilla, Kepala BWS Riau Ir Syahril, dan Asisten 3 Bupati Kampar.

Syahrul Aidi disela-sela peresmian menyampaikan bahwa SPAM IKK ini adalah harapan besar masyarakat Tapung Hulu sejak belasan tahun yang lalu. Tapung Hulu tergolong daerah sulit air, khususnya air bersih. Selama ini mengandalkan air hujan atau

air bawah tanah yang berwarna.

"Setahunan yang lalu perwakilan masyarakat Tapung Hulu mendatangi saya agar mereka disediakan akses air bersih. Mereka selama ini sulit mendapatkan hal itu. Berkat usaha bersama mulai Pemkab Kampar, Balai Kementerian, memudahkan saya untuk menyuarakan di kementerian. Alhamdulillah dikabulkan pak menteri dan hari ini kita sudah mulai pembangunannya." terang Syahrul Aidi.

SPAM IKK Suram ini diharapkan mampu mengaliri air di 1.800 rumah tangga. Setidaknya mencakup 3 desa yaitu Sukaramai, Sumber Sari, Kusau Makmur. Jika

memungkinkan akan menjangkau desa lainnya.

"Saya berharap kehadiran SPAM IKK ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pembangunan telah selesai mari kita jaga bersama karena ini aset kita bersama." tutupnya.

Sementara itu Kepala BWS Riau Syahril menyatakan pembangunan SPAM IKK ini akan dilaksanakan selama 2 tahun kerja.

"Kita berkomitmen untuk menjaga kualitas dan sesuai dengan standar kementerian PUPR" kata Syahril.

Intake SPAM IKK ini yaitu 20 liter/detik, ditargetkan mangaliri 1.800 sambungan rumah. Dengan sumber air yaitu Sungai Tapung dengan jarak yaitu 12 kilometer dari sumber air. SPAM IKK Suram ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 60 milyar untuk dua tahun anggaran.



**Dr. H. SYAHRUL AIDI  
MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

"Saya berharap kehadiran SPAM IKK ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pembangunan telah selesai mari kita jaga bersama karena ini aset kita bersama."

# Masa Reses, Hermanto Temui Masyarakat di Taman Nasional Siberut Mentawai

## KUTIPAN

Mentawai (28/07) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I, Hermanto dalam kunjungan kerja masa reses di Sumatera Barat menyempatkan diri menyebrang lautan dengan kapal motor (KM) Gambolo untuk menjumpai masyarakat yang tinggal di Taman Nasional Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam kunjungan tersebut Hermanto mengadakan berbagai kegiatan terkait upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Muara Sikabalu, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan tersebut antara lain: menyampaikan arahan dalam Bimbingan Teknis Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan RHL Mangrove; menyerahkan bantuan KBR; menyaksikan tarian adat Mentawai; menanam bibit produktif secara simbolis; meninjau percontohan ternak bebek galo-galo; mendengar

berbagai aspirasi masyarakat. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan menyerahkan bantuan tas sekolah secara simbolis kepada anak-anak usia sekolah dasar.

"Kegiatan ini merupakan bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terluar sekalipun" ujar Hermanto dalam sambutannya pada kunjungan tersebut.

Kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh negara, lanjut Hermanto, tentu disesuaikan dengan potensi yang ada di

sekitar masyarakat.

"Harapannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberdayakan masyarakat yang diinisiasi oleh negara bisa berlanjut dan secara bertahap mampu meningkatkan pendapatan masyarakat", ujar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Dalam kunjungan tersebut Hermanto didampingi oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Agam Kuantan Nursidah, Kepala Balai Taman Nasional Siberut Lugli Hartanto, Kepala Desa Muara Sikabalu Aprijal serta 2 tokoh Mentawai Ahmad Sidik dan Marzuki. Setelah sehabisan mengadakan rangkaian kegiatan di Mentawai, sore hari Hermanto dan rombongan kembali menyebrang ke Padang dengan KM Gambolo.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Kegiatan ini merupakan bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terluar sekalipun"



# Nur Azizah Rekrut Warga Kristiani Depok Jadi Anggota PKS

KUTIPAN

Depok - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A, bertemu dengan Perkumpulan Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Kota Depok.

Pada kesempatan ini, Nur Azizah meresmikan beberapa jemaat yang menjadi Anggota PKS. Berlokasi di, Jalan Pramuka Raya No. 49 Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Selain itu, ini Nur Azizah turut berdialog dengan para tokoh agama dari GPIB. Menurutny hal ini penting dilakukan, sebagaimana PKS mengemban Visi sebagai Partai Islam rahmatan Lil Alamin.

Menurutnya rumah bagi seluruh umat bergama di Indonesia. "Sebagai kader PKS sebagaimana dalam Visi, menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin, kita tidak membedakan berdasarkan suku, agama dan ras. PKS akan selalu terdepan dalam melayani seluruh warga

di NKRI", jelas Nur Azizah.

Salah satu bentuk pelayanan PKS. Di Depok Nur Azizah tidak segan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari umat Kristiani Depok.

"Beberapa waktu lalu, setelah raot dengar pendapat, saya bertemu dengan Pak Menteri Agama secara langsung. Ada titipan proposal dari Gereja ONKP Depok. Melalui Pak Menag sudah saya serahkan. Alhamdulillah langsung ditindak lanjut oleh Pak Urbanus, yang merupakan Sekertaris Dirjen Bimas Kristen", ungkap Nur Azizah.

Ia menambahkan, cukup banyak proposal yang masuk ke Dirjen Bimas Kristen. Namun semuanya tidak langsung ditindaklanjuti oleh Kement-

rian Agama. Karena ia menyampaikan secara langsung, sehingga menjadi prioritas.

"Banyaknya GPIB di setiap kelurahan di Kota Depok tidak membuat Kemenag langsung menindaklanjuti masalah pembangunan GPIB di beberapa kelurahan," ujar Nur Azizah.

Pihaknya telah meyampaikan kepada Kementerian Agama atas dasar serapan aspirasi masyarakat Kota Depok dalam setiap kunjungan reses.

Sinaga, salah satu tokoh Agama Kristiani turut berterimakasih atas upaya Nur Azizah. Ia mengaku saat ini sudah ada yang menghubungi pihak Gereja ONKP Depok, menegnai proposal yang sudah Nur Azizah serahkan.

"Terimakasih Ibu Nur sudah membantu memfasilitasi. Dari pihak Dirjen Bimas Kristen sudah ada yang menghubungi kami. Ia mengaku salut dengan Ibu Nur. Jarang ada adeg yang mana dari partai Islam, dengan cukup langtng juga menyuarakan kpentingan kami sebagai umat ristian. Sekali lagi, kami ucapkan banyak Terimakasih kepada Ibu Nur Azizah. Untuk itu pada kesempatan ini ada beberapa teman kami yang sudah siap menjadi Anggota PKS", jelas Sinaga.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Sebagai kader PKS sebagaimana dalam Visi, menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin, kita tidak membedakan berdasarkan suku, agama dan ras. PKS akan selalu terdepan dalam melayani seluruh warga di NKRI",





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kreatif Atraktif Substantif*



# Selamat

Atas Penyetaraan Gelar  
dari Kerajaan Maros Sulsel  
Kepada Dr. Salim

**I Waliuddin  
Karaeng Manaba  
Ri Marusu**

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

# Panggung Kreatif, Rafli **Sosialisasi** Stop Narkoba Hingga Santuni Anak Yatim

**KUTIPAN**

Banda Aceh (28/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli, gelar panggung kreatif bertajuk syair syair Rafli Kande, sosialisasi bahaya narkoba di Lapangan Blang Mee, Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, pada Rabu malam (27/07/2022) bersama Yayasan Lentera Muda Karya (LEMKA).

Kegiatan di Lhoong tersebut merupakan lokasi ke 6 dari 8 panggung road show yang tengah berlangsung selama 22-30 Juli 2022.

"Kegiatan ini dipandang perlu sebagai bentuk partisipasi kita dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Aceh. Dengan menjumpai langsung masyarakat di Aceh, semoga bisa tersentuh. Inshaallah," ucap Rafli.

Selain fokus pada kegiatan sosialisasi, Rafli juga melakukan dialog dengan forum kepala desa setempat

"Setiap titik lokasi panggung, pada pagi harinya kita lakukan dialog pembangunan ekonomi dengan forum kepala desa, kemudian pada malam harinya kita sosialisasi bahaya narkoba dan santuni anak yatim. Khusus santunan yatim semua masyarakat yang hadir ikut menyumbang secara suka rela, kemudian kita bagian langsung kepada anak yatim di lokasi," tutup Rafli.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir bersama legislatif komisi VI Rafli, Kepala

Kesbangpol Aceh Besar Drs. Sofyan, Kasatnarkoba, Polres Aceh Besar AKP Ismail, Kapolsek Lhoong, Nasril, Danramil Lhoong Rafilizar, Camat Lhoong, sejumlah kepala Desa, imum mukim, tokoh masyarakat dan ratusan warga memadati lapangan mukim Blang Mee yang jadi lokasi tempat kegiatan berlangsung jam 20.00-23.00 wib.

Politisi yang juga seniman etnik kontemporer itu, melakukan road show Syair Syair Puleh Kreatif Tanpa Narkoba di 8 lokasi dalam Provinsi Aceh, mulai dari Meureudu Pidie Jaya (22/07), Gajah Ayee, Pidie (23/07), Kota Bakti, Pidie,(24/07) Beureunung, Pidie (25/07), Indrapuri, Aceh Besar (26/07), Lhoong, Aceh Besar (27/07), Montasik, Aceh Besar (28/07), Sabang (30/07).



**RAFLI**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Nangroe Aceh Darussalam I

“Kegiatan ini dipandang perlu sebagai bentuk partisipasi kita dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Aceh. Dengan menjumpai langsung masyarakat di Aceh, semoga bisa tersentuh. Inshaallah”



# Ikuti Wirid se-Kabupaten Pasaman, Nevi **Sampaikan** Nilai Spiritual Perkokoh Mental dan Pemikiran

## KUTIPAN

Pasaman (27/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, pada kesempatan mengikuti wirid yasin Rawiya se Kabupaten Pasaman di Masjid Al Mabruur Muara Bangun Padang Gelugur, menyampaikan pentingnya memperkokoh nilai-nilai spiritual.

Nevi mengatakan, nilai spiritual ini tidak dapat digambarkan secara fisik, namun menjadi pondasi penting dalam memperkokoh mental dan pemikiran tiap insan. Ia menambahkan, nilai spiritual dalam agama apapun, akan mengarahkan pada nilai positif bagi sekitarnya, dan memiliki kualitas unggul baik fisik maupun moral dan akhlaknyanya.

“Dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, kita semua mesti memiliki stamina tinggi, tangguh dan ulet, cerdas dalam berpikir dan bertindak, terampil dan memiliki kompetensi, mandiri,

bertanggung jawab, produktif, kreatif, inovatif, berorientasi ke depan, disiplin, berbudi dan sebagainya. Untuk itu, lingkungan yang mengawali dalam pembentukan spiritual ini dapat diawali dengan Pembentukan individu-individu yang dipengaruhi oleh peranan ibu”, tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengingatkan, bahwa kondisi lingkungan saat ini, berhadapan dengan tantangan menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas di tengah gempuran arus hegemoni budaya asing yang semakin menggerus moral anak bangsa.

“Perlu ada suatu benteng internal yang dapat menghilangkan tindak kejahatan termasuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nilai Spiritual inilah yang akan menjadi benteng internal untuk memperkokoh mental dan pemikiran,” terang Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menguraikan, masih tingginya angka kekerasan pada anak dan perempuan, tingginya angka perdagangan perempuan (human trafficking) harus menjadi agenda bersama untuk dibarantas.

“Semoga dengan kegiatan wirid yang terencana dengan baik ini dan dilaksanakan secara berkelanjutan, akan mampu memberikan dampak yang terbaik buat bangsa dan agama kita ini. Saya senantiasa mendo’akan ibu-ibu dan tentunya juga bapak-bapak yang hadir di acara ini agar diberkahi hidupnya dan keluarganya Amiin”, tutup Nevi Zuairina.



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

“Dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, kita semua mesti memiliki stamina tinggi, tangguh dan ulet, cerdas dalam berpikir dan bertindak, terampil dan memiliki kompetensi, mandiri, bertanggung jawab, produktif, kreatif, inovatif, berorientasi ke depan, disiplin, berbudi dan sebagainya. Untuk itu, lingkungan yang mengawali dalam pembentukan spiritual ini dapat diawali dengan Pembentukan individu-individu yang dipengaruhi oleh peranan ibu”

# Hadiri Sosialisasi 4 Pilar, Alifudin Harap Sekolah Islam **Perkuat** Nilai-nilai Kebangsaan

## KUTIPAN

Pontianak (01/08) — Anggota DPR RI Dapil Kalbar 1, Alifudin menghadiri acara Sosialisasi 4 Pilar bersama Sekolah Islam Terpadu, di Aula BPSDM, Pontianak, pada minggu (31/7).

Dalam kesempatan tersebut, Alifudin berharap Anggota Sekolah Islam Terpadu Wilayah Kalimantan Barat, memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam aktivitas pendidikan di lingkungan jaringannya, hal ini disampaikan dalam

Dalam Sosialisasi empat pilar kali ini, Alifudin kembali menekankan pentingnya pemahaman dan komitmen kebangsaan.

"Keberlangsungan jalannya pemerintah dan kehidupan bangsa kita, sangat bergantung dari pemahaman dan komitmen kita terhadap 4 pilar, yaitu bentuk negara kita yaitu negara Kesatuan, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika", jelas

Alifudin di depan peserta sosialisasi 4 Pilar.

Salah satu pentingnya pemahaman dari empat pilar akan menambah komitmen dan ketaatan kita terhadap konstitusi dalam hal ini UUD 1945. Seperti contoh periodisasi kepemimpinan di negara.

Alifudin memberikan penekanan pada para Anggota Sekolah Islam Terpadu yang notabene adalah seorang guru harus selalu patuh dan taat pada Konstitusi Negara.

"Kalau dikatkan siapa yang paling pancasila, harusnya kita semua diruagan ini adalah orangnya karena para guru menekankan prinsip ketuhanan pada anak didiknya dan itu adalah pilar yang pertama dan

menjadi dasar pijakan kita dalam beragama dan berpendidikan", ujarnya.

Alifudin berharap, Anggota Sekolah Islam Terpadu Wilayah Kalbar dapat meneruskan dan menjelaskan tentang 4 pilar ini kepada anggotanya yang ada di seluruh daerah 14 Kabupaten/Kota.

Ketua Sekolah Islam Terpadu Indonesia Wilayah Kalbar, Zaenuri, yang turut hadir dalam acara sosialisasi 4 pilar tersebut, berterimakasih kepada Alifudin selaku anggota MPR RI yang menyediakan waktunya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah kami berterimakasih, kepada pak Alifudin yang bisa hadir menjelaskan tentang 4 pilar kepada Anggota Sekolah Islam Terpadu Kalbar, kami berharap hal ini bisa menjadi motivasi dan semangat pada anggota SIT seluruh Kalbar dan bisa di aplikasikan dan diterapkan ke sekolah masing-masing", pungkasnya.



## H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Keberlangsungan jalannya pemerintah dan kehidupan berbangsa kita, sangat bergantung dari pemahaman dan komitmen kita terhadap 4 pilar, yaitu bentuk negara kita yaitu negara Kesatuan, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika", jelas Alifudin di depan peserta sosialisasi 4 Pilar.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kreatif Abstraktif Substantif*

# TERIMA KASIH TIMNAS U-16

Atas kado HUT  
Kemerdekaan RI ke-77



# CHAMPIONS



[fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

[fpxs.dpr.ri](https://fpxs.dpr.ri)

[fraksi.pks.dpr.ri](https://fraksi.pks.dpr.ri)

[@fpxs\\_dprri](https://twitter.com/fpxs_dprri)

[fpxs.tv.dpr.ri](https://www.facebook.com/fpxs.dpr.ri)





# Bertemu Konstituen, Habib Aboe Ajak Masyarakat Perkuat Kemandirian Pangan untuk Atasi Resesi

## KUTIPAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (02/08) --  
- Anggota DPR sekaligus MPR RI dari  
Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan  
Kalimantan Selatan 1, Habib Aboe Bakar  
Alhabsy, menyampaikan perlunya  
memperkuat kemandirian pangan.

Hal ini disampaikan, Habib  
Aboe, saat menjawab  
pertanyaan peserta Sosialisasi  
Empat Pilar di Kabupaten Hulu  
Sungai Selatan, Kalimantan  
Selatan (01/08/2022).

"Memang resesi saat ini  
sudah banyak dialami berbagai  
negara, salah satunya Amerika  
Serikat yang saat ini mulai  
masuk jurang resesi. Tentunya  
hal ini memang perlu  
diantisipasi oleh pemerintah  
dan masyarakat Indonesia. Bisa  
saja akan ada dampak yang  
dirasakan disini", terang ketua  
Mahkamah Kehormatan Dewan  
tersebut.

Habib Aboe  
menyampaikan bahwa dampak  
resesi ini akan dirasakan secara  
langsung oleh para pelaku

ekspor impor.

"Terganggunya proses  
ekspor impor yang menjadi  
penyebab terjadinya resesi saat  
ini. Oleh karenanya, yang  
banyak terdampak atas situasi  
ini adalah para pelaku usaha  
lintas negara. Mereka yang  
merasakan dampak secara  
langsung dari kondisi ini", papa  
Sekjend DPP PKS tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe  
mengingatkan ada dua potensi  
dampak resesi yang akan  
dirasakan masyarakat.

"Pertama, karena adanya  
kekurangan bahan baku bisa  
jadi akan terjadi peningkatan  
pemutusan hubungan kerja.  
Tentunya berakibat naiknya  
jumlah pengangguran di  
Indonesia. Kedua, adanya

inflasi pada bahan pangan,  
sehingga dimungkinkan harga  
kebutuhan pokok masyarakat  
juga akan naik", jelasnya lebih  
lanjut.

Untuk mengatasi hal  
tersebut, Habib Aboe Bakar  
menyarankan agar masyarakat  
memperkuat kemandirian  
pangan.

"Untuk kita yang di desa,  
masih banyak lahan kosong.  
Mari kita manfaatkan untuk  
memperkuat ketahanan  
pangan. Sehingga kita bisa  
mengurangi dampak kenaikan  
harga pangan, karena  
masyarakat sudah menanam  
sendiri kebutuhan pangan  
sehari hari. Saya meyakini  
masyarakat di pedesaan akan  
memiliki daya tahan yang lebih  
baik dalam menghadapi resesi  
yang ada," pungkas Habib Aboe  
mengakhiri.

## SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR-RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang  
Dasar NRI Tahun 1945 dan TAP MPR Sebagai Konstitusi Negara,  
NKRI sebagai bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai  
Sembayan Negara.

Kalimantan Selatan  
1 AGUSTUS 2022

Bersama:

Habib Aboe Bakar Alhabsy

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

"Untuk kita yang di desa, masih banyak  
lahan kosong. Mari kita manfaatkan  
untuk memperkuat ketahanan pangan.  
Sehingga kita bisa mengurangi dampak  
kenaikan harga pangan, karena  
masyarakat sudah menanam sendiri  
kebutuhan pangan sehari hari. Saya  
meyakini masyarakat di pedesaan akan  
memiliki daya tahan yang lebih baik  
dalam menghadapi resesi yang ada"

# Reses di Dapil, Syaikhuluncurkan Gerakan PKS Berbagi 1.000 Paket Perlengkapan Sekolah

## KUTIPAN

Kabupaten Bekasi (02/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhuluncurkan Gerakan PKS Berbagi 1.000 Paket Perlengkapan Sekolah di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda reses Syaikhul dari tanggal 17-24 Juli.

Menurut Syaikhul, kegiatan yang diadakan Bidang Kesejahteraan Sosial DPD PKS Kabupaten Bekasi ini sangat layak diapresiasi apresiasi dan dukung seoptimal mungkin.

"Ini patut kita apresiasi dan berikan dukungan. Saya mengucapkan terimakasih kepada DPD PKS Kabupaten Bekasi yang telah meninisiasi kegiatan ini," kata Syaikhul.

Syaikhul menjelaskan, Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama 2 tahun memberikan dampak pada semua sektor kehidupan. Tak terkecuali dunia pendidikan. Dari proses pembelajaran

daring hingga banyak siswa yang kesulitan membayar biaya sekolah, karena orangtuanya tak lagi bekerja terkena imbas pandemi. Selain itu, untuk mendapatkan perlengkapan sekolah yang layak pun menjadi kendala.

"Apakah Pandemi Covid-19 membuat bapak ibu kesulitan membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak?", tanya Syaikhul kepada orang tua yang hadir.

"Kesulitan Pak," jawab mereka.

Fenomena ini menurut Syaikhul tidak bisa dibiarkan. Sebab berpotensi semakin

menurunkan kualitas pendidikan kita dan ujungnya adalah kian murahnya kualitas SDM kita. Di tengah dunia yang terus bergerak sangat dinamis di Era Digital, tantangan dan persaingan kehidupan semakin tinggi.

"Hadirnya kualitas SDM yang tangguh dan mumpuni jadi sebuah kebutuhan dan keniscayaan," tegas Syaikhul. Anggota Komisi I DPR RI itu melanjutkan, Acara semacam ini bisa menjadi salah satu ikhtiar solusi mengatasi persoalan di atas.

Semangat berbagi sendiri merupakan ruh dari PKS. Atau semacam DNA-nya kita. Keberadaan PKS tak hanya sebagai partai politik yang memperebutkan kekuasaan, tapi juga melayani dan berbagi," ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi MM, Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPD PKS Kabupaten Bekasi Sumarsono dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Erwyn Kurniawan.



## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Semangat berbagi sendiri merupakan ruh dari PKS. Atau semacam DNA-nya kita. Keberadaan PKS tak hanya sebagai partai politik yang memperebutkan kekuasaan, tapi juga melayani dan berbagi"



Salurkan Bantuan untuk UMKM

# Anis Byarwati: Aksi Nyata Tingkatkan Ekonomi Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (02/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati, kembali menyalurkan bantuan peralatan usaha melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada kelompok UMKM yang berada di daerah Cipayung dan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kali ini bantuan diberikan kepada dua kelompok UMKM. Pertama, kelompok Sejahtera 5 Fashion Cipayung yang bergerak di bidang craft dan fashion.

Kedua, kelompok Waroeng UKM Kramat Jati yang bergerak dibidang usaha kuliner. Total masing-masing kelompok memiliki 30 unit usaha yang mendapatkan berbagai macam bantuan peralatan usaha senilai lebih dari 350 juta rupiah untuk menunjang usaha mereka.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi XI DPR RI ini menyampaikan bahwa advokasi PSBI yang dilakukannya, merupakan tindakan nyata untuk membantu masyarakat.

"Advokasi yang saya lakukan, merupakan dukungan nyata dan langsung dari saya

untuk membantu masyarakat yang ingin berusaha, memiliki tekad berjuang bersama untuk bisa mandiri berpenghasilan. Dengan bantuan ini diharapkan kondisi ekonomi masyarakat semakin meningkat," ujar Anis.

Dalam kesempatan yang sama, Anis yang juga didaulat sebagai Bunda UMKM Jakarta Timur, mengatakan bahwa setiap tahun permintaan masyarakat terus meningkat. Hingga pada tahun 2022 ini, sebanyak 1050 unit UMKM telah dibantu dan sedang dalam proses pengajuan bantuan PSBI.

"Bantuan peralatan ini adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Dan saya berkomitmen akan terus mengadvokasinya agar bisa

membantu masyarakat dan mendorong para pelaku UMKM agar semakin maju dan bermanfaat lebih luas. Bahkan saya berharap bisa merekrut tenaga kerja menciptakan lapangan pekerjaan", ungkapnya.

Lebih lanjut, Anis menyampaikan bahwa dirinya bersama PKS melalui Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) akan terus melakukan pembinaan UMKM.

"Bersama BPJE PKS, pembinaan dan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM juga akan terus dilakukan", kata Anis.

Menurutnya peningkatan program UMKM sangat penting dan harus mendapatkan perhatian lebih serius.

Kementerian koperasi pada Mei 2022 mencatat, sumbangan UMKM terhadap PDB nasional pada kisaran 61 persen sementara serapan tenaga kerja sebesar 97 persen.

Acara serah terima kali ini juga dihadiri oleh Camat Kramat Jati, Lurah Batu Ampar, dan tokoh masyarakat lainnya. Diakhir sesi, para anggota UMKM memperkenalkan berbagai macam produk usahanya dan berfoto bersama.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Bantuan peralatan ini adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Dan saya berkomitmen akan terus mengadvokasinya agar bisa membantu masyarakat dan mendorong para pelaku UMKM agar semakin maju dan bermanfaat lebih luas. Bahkan saya berharap bisa merekrut tenaga kerja menciptakan lapangan pekerjaan"





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# *Salurkan* **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

**Ajuan Aspirasi**

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



# Terima Kunjungan dari Alumni APP, Aleg PKS: Anggota DPR Wajib Miliki Kompetensi

## KUTIPAN

Jakarta (27/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, berkesempatan untuk menerima kunjungan dari alumni Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) tahun 1985.

Salah satu rangkaian kunjungan adalah touring komplek parlemen, meliputi Ruang Rapat Paripurna, Komisi XI, Ruang BAKN, hingga Ruang Meeting Fraksi PKS.

Ketua Alumni APP, Madani Madali, mengungkapkan rasa syukurnya karena difasilitasi untuk bersilaturahmi ke gedung DPR.

"Ini menjadi satu pelajaran tersendiri dan pengalaman berharga bagi kami. Terima kasih banyak telah memfasilitasi. Kami jadi paham bagaimana rasanya menjadi anggota DPR," kata Madani.

Anis mengenalkan seluk beluk DPR secara komprehensif, mulai dari jumlah komisi, jumlah fraksi, hingga mekanisme kerja serta penentuan proporsi jumlah anggota DPR pada setiap

bagian.

"Bahagia sekali rasanya dapat bertemu langsung dengan sahabat-sahabat (alumni APP)," ungkap Anis sebagai pembuka.

"Selain di Komisi XI, saya juga berperan di BAKN. Sebagai informasi, komposisi keanggotaan BAKN adalah 1 fraksi mendelegasikan 1 orang. Jadi saat ini totalnya adalah 9 orang (sesuai jumlah fraksi)," sambung Wakil Ketua BAKN DPR RI ini.

Anggota DPR, imbuhnya, wajib memiliki kompetensi dan menguasai berbagai topik yang dibawa oleh mitra komisi. Kinerja utama anggota DPR adalah mengawasi pemerintah, sehingga terasa aneh jika anggota DPR (sebagai pengawas) malah minim kemampuan.

"Jadi anggota DPR, pintunya satu, yaitu parpol. Sebagai informasi lainnya, seluruh anggota dari berbagai fraksi memberi masukan saat rapat. PKS selama ini vokal mengkritisi berbagai persoalan, namun sistem demokrasi mengharuskan kuantitas di samping kualitas, sehingga keputusan diambil dari suara terbanyak," pungkas Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta I ini.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI



"Anggota DPR, wajib memiliki kompetensi dan menguasai berbagai topik yang dibawa oleh mitra komisi. Kinerja utama anggota DPR adalah mengawasi pemerintah, sehingga terasa aneh jika anggota DPR (sebagai pengawas) malah minim kemampuan."



Terima Aspirasi Dari DPRD  
Kab. Pulau Morotai,

## Mardani: Akan Kami Sampaikan Ke Mitra Kerja Komisi II

KUTIPAN

Jakarta (29/07) -- Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, Menerima aspirasi dari DPRD Kab. Morotai terkait izin revisi peraturan Bupati Morotai No.5 Tahun 2021 dan no.15 tahun 2021.

Ajuan ini disampaikan langsung oleh Rasmin selaku anggota legislatif dari Kab. Pulau Morotai yang menyampaikan harapannya agar persoalan ini bisa diadvokasi melalui Mardani selaku anggota Komisi II DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam ungkapnya, Rasmin menyampaikan bahwa secara kelembagaan telah terjadi diskomunikasi hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD di Kab. Pulau Morotai yang telah berlangsung sejak tahun 2020, sehingga memunculkan peraturan daerah No.5 tahun 2021 dan No. 15

tahun 2021 oleh Bupati Pulau Morotai, yang berdampak pada alokasi anggaran DPRD. Sebab aturan di nilai merugikan sepihak, khususnya hilangnya beberapa tunjangan bagi Anggota DPRD kab. Morotai.

"Kronologis konflik ini bermula saat kami menyampaikan surat kepada pemda Pulau Morotai atas kepatutan dan kedisiplinan penyusunan APBD sebagaimana aturan perintah dan ketentuan perundang-undangan. Namun surat ini tidak ditanggapi, justru pemda malah bertindak mengatur anggaran tanpa melibatkan kami" ungkap Rasmin

Rasmin menambahkan, jika pada posisi inilah dimulainya ketegangan atau hubungan kemitraan yang tidak lagi harmonis antara pemda dan DPRD, sehingga menimbulkan konflik internal lainnya. "Permasalahan ini terus berlanjut hingga Bupati Pulau Morotai, menerbitkan kedua perda yakni No.5 tahun 2021 dan No.15 tahun 2021 yang bersifat merugikan kami selaku anggota legislatif. Tertuang dalam aturan ini, bahwa tunjangan pimpinan DPRD dan anggota DPRD seperti perumahan, transportasi, komunikasi insentif dihapus secara sepihak" Ungkapnya lagi Olehnya perwakilan DPRD Kab. Pulau Morotai ini menuntut, kiranya bisa mendapatkan bantuan advokasi bersama kemandagri agar menemukan titik terang sekaligus kembali merelisasikan kebutuhan DPRD Kab. Morotai yang sebelumnya telah dihapus.

Menyototi hal tersebut, Mardani selaku anggota Komisi II DPR, menyampaikan keprihatinannya atas apa yang terjadi dalam pemerintahan Kab. Morotai beberapa tahun ini.

"Seharusnya sebagai lembaga eksekutif dan legislatif harus memiliki sikap yang solid dan saling mendukung demi terselenggaranya pemerintahan yang baik untuk masyarakat. Sebab kepala daerah yang baik harus menjalin komunikasi yang baik ke semua kemitraannya salah satunya Dewan Perwakilan



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

"Seharusnya sebagai lembaga eksekutif dan legislatif harus memiliki sikap yang solid dan saling mendukung demi terselenggaranya pemerintahan yang baik untuk masyarakat. Sebab kepala daerah yang baik harus menjalin komunikasi yang baik ke semua kemitraannya salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"

an Rakyat Daerah" ungkap Mardani.

Lanjutnya, Aleg dari dapil DKI Jakarta I ini menuturkan, bahwa aspirasi ini akan ia komunikasikan kepada dirjen terkait di Kementerian Dalam Negeri. Namun kiranya penyampaian ini juga harus dibarengi oleh fakta dan bukti yang valid agar apa yang disampaikan

dapat ditindak lanjut.

"Atas hal ini akan saya komunikasikan baik informal maupun formal kepada dirjen kementerian Dalam Negeri. Kiranya masukan-masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi kami di komisi. Dan jangan lelah dan ragu dalam aksi karena itu lebih baik dari pada diam" pungkas Mardani.

# Gebyar Hari Anak Nasional di Dapil, Aleg PKS Minta Orangtua Tingkatkan Kepekaan Terhadap Anak

## KUTIPAN

Tasikmalaya (26/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS bersyukur, Toriq Hidayat, menyambut Hari Anak Nasional 2022 pada tanggal 23 Juli ini bersama Struktur PKS Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam kesempatan tahun ini, masing-masing menggelar acara Bazar dan Senam PKS di lapangan Dadaha dan edukasi stunting di Kec. Tanjungjaya.

“Alhamdulillah, menyambut Hari Anak Nasional tahun ini, pengurus PKS kokab Tasikmalaya mengelhat acara untuk keluarga. Bukan hanya untuk anak. Tapi juga untuk kedua orangtuanya. Saya berharap kegiatan ini semakin memperkuat tali kasih sayang dalam keluarga,” ujar Toriq Hidayat.

Menurut Politisi asal dapil Jabar XI ini, sebagaimana pandangan Islam, seorang anak memiliki kedudukan. Diantaranya, anak adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orangtuanya. Karenanya harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh

dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani.

“Berikutnya sebagai penerus garis keturunan. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mendidik dan memperhatikan anak dengan baik,” tambah Toriq.

Selanjutnya, Islam juga mengingatkan bahwa anak merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT, sebut Tokoh Ulama di Ciawi ini. seorang Anak dapat mengangkat orangtuanya masuk ke dalam Syurga. Sebaliknya ia dapat menjatuhkan orangtuanya ke dalam jurang api neraka.

“Merengungi hal-hal diatas tersebut, saya sangat prihatin akan kabar meninggalnya

seorang anak baru-baru ini yang terjadi di Tasikmalaya, dikarenakan kasus perundungan. Apa yang dialaminya tentu membuat si korban terguncang jiwanya. Sayangnya, depresi yang dirasakan kemungkinan tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya,” sebut Toriq.

Karenanya, ia sangat berharap kepada seluruh orangtua, khususnya peserta kegiatan Hari Anak Nasional yang digagas oleh PKS ini untuk meningkatkan kepekaan dan pemahaman terhadap kondisi anak. Sekalipun anak mungkin tidak menceritakan apa yang terjadi padanya. Orangtua harus memiliki intuisi terhadap perubahan perilaku sekecil apa pun.

“Menurut psikolog anak, banyak diantara mereka yang lihai menyembunyikan gejala depresi. Mengalami tekanan tidak selalu dalam bentuk diam. Ada anak yang tertawa terus. Jadi, bila ada sesuatu perubahannya sedikit saja, tidak seperti biasanya, mohon untuk tidak diabaikan. Bangunlah komunikasi dua arah dengan anak,” tutup Toriq.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Menyambut Hari Anak Nasional tahun ini, pengurus PKS kokab Tasikmalaya mengelhat acara untuk keluarga. Bukan hanya untuk anak. Tapi juga untuk kedua orangtuanya. Saya berharap kegiatan ini semakin memperkuat tali kasih sayang dalam keluarga,”



# Peringati Hari ASI Sedunia, Aleg PKS: Momentum Implementasi Gizi Seribu Hari Pertama Kehidupan

**KUTIPAN**

Jakarta (01/08) — Momentum Hari ASI Sedunia yang diperingati setiap 1 Agustus harus jadi momentum bagi upaya penanganan stunting dengan pemberian ASI Eksklusif dan nutrisi 1.000 hari pertama kehidupan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengingatkan pentingnya perhatian terhadap asupan gizi 1.000 hari pertama kehidupan. Perhatian gizi ibu dan anak penting pada 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah kelahiran.

"Di sini peran penting ASI Eksklusif untuk memastikan gizi dan nutrisi anak terpenuhi karena periode 1.000 hari pertama kehidupan adalah periode emas. Ikhtiar memberikan ASI Eksklusif adalah upaya untuk mencegah angka stunting sejak dini.

Pemberian ASI Eksklusif dan 1.000 hari pertama kehidupan membutuhkan dukungan bukan hanya bagi

anak tapi juga untuk sang ibu.

"Dukungan kepada ibu yang sering terlewatkan. Agar bisa memberikan ASI secara maksimal, kondisi psikologis ibu pun harus terjaga selain memastikan asupan gizi untuk ibu. Disinilah peran penting keluarga termasuk ayah," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Senin (01/08).

Kurniasih mengungkapkan persoalan stunting dan angka kematian ibu dan anak masih tinggi di Indonesia. Hasil survei Status Gizi Indonesia (SGI) 2021 Kemenkes menunjukkan 1 dari 4 anak Indonesia, atau sekitar 24,4 persen, mengalami stunting. Angka ini masih jauh dari angka prevalensi yang ditargetkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 14 persen.

Sementara proporsi kematian ibu saat melahirkan kurang lebih 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup, jauh dari target RPJMN menjadi 183 kematian per 100 ribu kelahiran hidup per 2024.

"Maka jangan anggap enteng proses pemberian ASI Eksklusif dan juga perhatian terhadap 1.000 hari pertama kehidupan sangat berpengaruh terhadap upaya penanggulangan stunting dan menekan angka kematian ibu dan anak," kata Kurniasih.

Dukungan terhadap pemberian ASI Eksklusif juga sudah dilakukan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang tengah dibahas. Fraksi PKS menyampaikan usulan yang diakomodir yakni setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi yang menyusui, menyiapkan dan atau menyimpan asi susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja.

"Termasuk F-PKS



## Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

**"Jangan anggap enteng proses pemberian ASI Eksklusif dan juga perhatian terhadap 1.000 hari pertama kehidupan sangat berpengaruh terhadap upaya penanggulangan stunting dan menekan angka kematian ibu dan anak"**

mengapresiasi atas disetujuinya pemberian hak cuti melahirkan bagi perempuan bekerja paling sedikit 6 bulan dan pemberian hak cuti bagi suami yang mendampingi istrinya melahirkan atau keguguran,

tanpa kehilangan haknya atas upah dan posisi pekerjaannya yang semula ditolak oleh mayoritas fraksi pada saat penyusunan RUU Ketahanan Keluarga," sebut Kurniasih.

# Hari Anak Nasional, Nevi Zuairina: **Keluarga** Tempat Terbaik Tumbuh Kembang Anak

## KUTIPAN

Jakarta (25/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, pada kesempatan hari anak nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, merasa prihatin dengan adanya kejadian perundungan atau bully yang menyebabkan seorang anak Sekolah Dasar meninggal dunia akibat depresi.

Nevi mengatakan, peran keluarga, mulai dari Ayah, Bunda dan saudara adik kakak, mesti menjadi team solid untuk saling menjaga dan melindungi. Menurutnya, Keluarga merupakan tempat terbaik untuk tumbuh kembang anak, baik dari fisik, psikis maupun spiritualnya.

"Saat ini anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka anak-anak adalah buah hati orang tua dan keluarga, sehingga sangat penting agar masa depan mereka terjamin dan selamat dari dari segala kekerasan baik tekanan fisik maupun mental", tutur Nevi.

Nevi menambahkan, Kekerasan terhadap anak yang belakangan ini terjadi memberi sinyal bahwa betapa kita harus kerja ekstra keras menjaga moral anak anak kita agar tetap beradab dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama.

Momentum hari anak nasional tahun 2022 ini, lanjut Nevi, mesti kita jadikan tonggak untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia, baik orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Melalui kepedulian dalam

menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi.

"Kita semua sudah menyadari, bahwa spirit hari anak ini adalah bagaimana kita menjaga dan melindungi anak sebagai aset dan masa depan kemajuan bangsa Indonesia. Untuk memperkuat anak untuk Indonesia Maju, menjadi tantangan bagi kita para orang tua dalam mendidik anak-anak untuk memiliki pondasi kuat dalam cara berpikir, bertindak dan penguatan mental spiritual. Generasi yang cinta Al

Qur'anlah yang nantinya menjadi insan yang memiliki ideologi kuat penjaga moral dan keutuhan bangsa", jelas Nevi. Legislator Sumatera Barat ini mengingatkan, akan pengaruh kecanduan gadget dengan berbagai platformnya, dimana memiliki dampak yang tidak diduga apakah menjadi arah yang baik atau semakin merusak.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

"Tak bisa dimungkiri, kehidupan anak zaman sekarang begitu akrab dengan teknologi digital. Kehadiran gadget bisa memudahkan kehidupan manusia, mulai dari membantu bekerja, belajar, berbelanja, atau sekadar mencari hiburan. Namun ada juga dampak negatif dari gadget ini, sehingga para orang tua harus hati-hati dan disiplin mengarahkan dan membatasi anak-anak dalam penggunaan gadget. Karena ternyata bisa meningkatkan risiko kecanduan"



*Turut  
Berduka  
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas Wafatnya

## **Habib Zein Umar bin Smith**

Ketua Dewan Syuro Rabithah Alawiyah

Semoga almarhum husnul khatimah dan semua  
kebaikan serta amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.  
Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan  
kekuatan dan kesabaran.



**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# PKS Siap Mendaftar Peserta Pemilu 2024 di Hari Pertama

## KUTIPAN

Jakarta (28/07) — Terkait dengan proses pendaftaran peserta Pemilu 2024 yang akan dibuka mulai tanggal 1 Agustus 2022, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-habsyi menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan mendaftarkan diri di hari pertama saat pendaftaran dibuka KPU.

Hal tersebut dinyatakan oleh Aboe di DPP PKS dalam acara Konsolidasi Tim Verpol DPP PKS untuk persiapan pendaftaran Pemilu 2024 yang juga mengundang Komisioner KPU Idham Holik yang diundang hadir sebagai pembicara diskusi mengenai proses administrasi pendaftaran Pemilu 2024 (27/7).

"PKS sudah siap mengikuti proses verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU dan akan langsung mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 di hari pertama ketika dibuka proses pendaftaran", ungkap Habib Aboe.

Habib Aboe menambahkan bahwa seluruh jajaran struktur PKS mulai dari tingkat pusat,

Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan sudah mempersiapkan sejak jauh hari bahkan melakukan proses verifikasi internal dan semuanya sudah siap memenuhi semua persyaratan.

"DPP PKS sudah melakukan proses verifikasi internal di seluruh Provinsi se-Indonesia bahkan melakukan pengecekan dan verifikasi administrasi hingga ke tingkat Kecamatan. Oleh karena itu, sudah kami pastikan insya Allah PKS memenuhi seluruh persyaratan dan siap menjadi peserta Pemilu 2024, serta berikhtiar menargetkan perolehan suara signifikan di Pemilu 2024 yang akan datang", ujar Habib Aboe.



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"DPP PKS sudah melakukan proses verifikasi internal di seluruh Provinsi se-Indonesia bahkan melakukan pengecekan dan verifikasi administrasi hingga ke tingkat Kecamatan. Oleh karena itu, sudah kami pastikan insya Allah PKS memenuhi seluruh persyaratan dan siap menjadi peserta Pemilu 2024, serta berikhtiar menargetkan perolehan suara signifikan di Pemilu 2024 yang akan datang"

PKS Daftar Hari Pertama

# Presiden PKS: Ini Bukti Semangat dan Kesiapan Kami di Pemilu 2024

## KUTIPAN

Jakarta (01/08) — PKS secara resmi mendaftarkan keikutsertaannya dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, (01/08/2022).

Presiden PKS Ahmad Syaikhuddin didampingi Sekretaris Jenderal Habib Aboe Bakar Al-Habsy beserta rombongan turut mengapresiasi atas seluruh partisipasi serta kerja jajaran kesekjenan, DPP, DPW, DPD dan DPC, DPRa yang antusias sampai ke tahap verifikasi parpol hingga proses pendaftaran ini.

"Alhamdulillah PKS secara sipol sudah memenuhi persyaratan yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan hari ini kita mendaftar secara resmi, dan insyaallah tidak ada kendala-kendala berarti di dalam verifikasi parpol ini" ungkap Syaikhuddin

Anggota komisi I DPR RI ini juga mengungkapkan semangat dan kesiapan PKS di Pemilu

2024 dibuktikan dengan kehadiran PKS di hari pertama pendaftaran Parpol di kantor KPU pagi tadi.

"Terus terang kami dan kesekjenan dan seluruh jajaran DPTP menengajakan untuk mendaftar di hari pertama, karena ini semangat dan kesiapan kami untuk mengikuti pemilu 2024" jelasnya.

Di hadapan media, Ahmad Syaikhuddin juga memohon doa kepada masyarakat Indonesia untuk kelancaran setiap tahapan proses menuju pemilu 2024.

"Memohon doa kepada warga dan bangsa Indonesia semoga Pemilu 2024 berjalan lancar dan Insyaallah bisa di selenggarakan dengan lebih demokratis," pungkasnya.

**H. AHMAD SYAIKHU**

Presiden PKS

"Alhamdulillah PKS secara sipol sudah memenuhi persyaratan yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan hari ini kita mendaftar secara resmi, dan insyaallah tidak ada kendala-kendala berarti di dalam verifikasi parpol ini"

Jelang Pendaftaran Parpol  
Hari Pertama

# Habib Aboe: PKS Siap Sukseskan Pemilu 2024

## KUTIPAN

Jakarta (31/07) — Menjelang pendaftaran partai politik di hari pertama, PKS dengan serius menyiapkan persyaratan verifikasi partai politik.

Hal ini diungkapkan oleh Sekjen DPP PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy.

"Kita ingin berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu 2024 ini, karenanya kita mencoba daftar di hari pertama. Ini bagian dari semangat kita untuk mensukseskan Pemilu mendatang," terang Legislator dari Kalimantan Selatan tersebut.

Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran, imbuh Habib Aboe, sudah dipenuhi oleh PKS.

"Alhamdulillah semua persyaratan yang harus diupload di Sipol sudah terpenuhi. Mulai dari profil, pengelolaan, kantor anggota sudah centang ijo semua. Selain itu, LO dari PKS sudah berkonsultasi ke KPU untuk teknis

pendaftaran besok", terang ketua MKD DPR RI tersebut.

PKS, kata Habib Aboe, mengaku siap mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh KPU.

"Kita akan mengikuti semua prosedur dari KPU, hanya dua LO dan sepuluh pengurus yang bisa masuk. Selain itu KPU mengizinkan 50 orang bisa masuk ke halaman KPU, namun tidak bisa ke dalam ruangan. Kita ikuti semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU." papar Habib Aboe.

Secara khusus PKS, lanjutnya, menyatakan ingin membawa suasananya gembira pada setiap tahap Pemilu.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"Kita sebenarnya ingin tiap tahap pemilu ini suasananya fun gitu, sehingga bisa dinikmati semua. Insha Allah besuk kita akan ada palang pintu dan hadrah yang mengiringi proses pendaftaran di KPU. Selain untuk membawa suasana gembira juga ini bentuk pelesarian kita terhadap budaya Indonesia",



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV DPR RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***